

**REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI (STUDI BUMDES SEBAGAI  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN  
DESA SANGIANG KABUPATEN BIMA)**

SKRIPSI



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Sarjana pada Pogram Studi Pendidikan Sosiologi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

**IRDANSYAH**  
**1053 82963 14**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Irdansyah, 10538296314** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 165 Tahun 1441 H/2019 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Ahad, 29 September 2019

28 Muharram 1441 H  
Makassar, -----  
28 September 2019 M

### PANITIA UJIAN

Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

Ketua : Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd.

Penguji

1. Kabarruddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

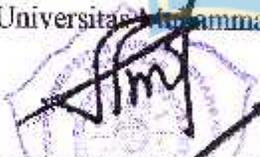
2. Risfaisal, S.Pd., M.Pd.

3. Dr. Abd. Azis Muslimin, M. Pd.

4. Aliem Bahri, S.Pd., M.Pd.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Rekonstruksi Sosial Ekonomi (Studi Bundes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima)

Nama : Irdansyah

NIM : 10538296314

Prodi : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

28 Muharram 1441 H

Makassar,

28 September 2019 M

Disahkan oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Eliza Melvani, M.Si.

  
Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Mengetahui

Dekan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi  
Pendidikan Sosiologi

  
Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.  
NBM: 860 934

  
Drs. H. Nurdin, M.Pd.  
NBM: 575 474

# MOTTO

“SEBAIK-BAIK ORANG ADALAH  
YANG BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN”.

(Muhammad Sallahualahi Wasallam)



“KITA DIDEFINISIKAN DENGAN PERBUATAN, BUKAN  
DENGAN PERKATAAN KITA”



Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada orang-orang yang berperan langsung maupun yang tidak langsung dalam hidupku sehingga aku sampai pada titik ini  
Terima Kasih Banyak

## ABSTRAK

**Irdansyah**, 2019. “*Rekonstruksi Sosial Ekonomi (Studi Bumdes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima)* Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Eliza Meiyani dan Kaharuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha Bumdes dikalangan masyarakat Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima, Untuk mengetahui Rekonstruksi Sosial Ekonomi dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang pemberdayaan masyarakat lewat bumdes dan kondisi perekonomian masyarakat nelayan. Informan ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan karakteristik informan yang telah ditetapkan yaitu pengurus BUMDes, pemerintah desa, serta masyarakat nelayan desa sangiang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik analisis data melalui berbagai tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini dari aspek Pemanfaatan : Bumdes Dalam pemanfaatan Usaha BUMDES pada masyarakat nelayan Di Desa Sangiang belum membuahkan hasil dan menyentuh nelayan dan belum pernah mendapatkan atau merasakan manfaat dari BUMDES itu sendiri bahkan unit-unit usaha yang dibuat oleh pengurus bumdes BUMDES Sangiang telah gagal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Sementara dari aspek Rekonstruksi Sosial Ekonomi : Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula harus dilakukan agar kemudian terjadi perubahan dalam aspek ekonomi maupun social masyarakat nelayan.

**Kata Kunci : Rekonstruksi Sosial Ekonomi, Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

## KATA PENGANTAR



Tak ada yang bisa saya lakukan untuk mensyukuri setiap detak nafas kehidupan yang Tuhan berikan selain tetap menjalani kehidupan sebagaimana mestinya dan sesekali mendesah penuh kepuasan, rasa syukur atas rangkaian nikmat yang tumpah dari sang Penguasa kosmos. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dan sesekali disapa coba, semakin tak ada keraguan dalam diri saya bahwa Dialah sandaran hati dikala kita teraniaya sunyi. Tak lupa shalawat dan salam *respect full* untuk sang revolusioner sejati Muhammad saw, yang sabdanya, semangatnya, keberanian dan kebersahajaannya tetap menjadi inspirasi bagi generasi-generasi yang selalu melawan ketidakadilan.

‘Akhirnya...’ kata itu yang pertama kali keluar setelah karya ini saya rampungkan, menyusul kemudian kata ‘alhamdulillah’. Walaupun tak sempurna yang saya bayangkan sebelumnya. Memang benar, jika ada yang mengatakan, manusia tidak akan hidup tanpa manusia lain. Atau manusia tidak akan bekerja tanpa bantuan manusia lain. Oleh karena bantuan itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Rekonstruksi Sosial Ekonomi (Studi Bumdes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima) dapat diselesaikan sebagai salah satu tugas akademik untuk memperoleh gelar sarjana “Sarjana Pendidikan” Pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Melalui kesempatan ini, maka perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta H. Ulama dan Ibunda tercinta Hj. Armah, dan umiku tercinta Hj. Martiah yang tercipta sebagai orang tua yang tiada duanya di dunia ini, dengan susah payah dan ketulusannya mencurahkan cinta, kasih sayang dan perhatiannya dalam mendidik dan membesarkan disertai dengan iringan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga ananda dapat membalas setiap tetes keringat yang tercurah demi membantu ananda menjadi seorang manusia yang berguna. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kakakku Eka ilham S.pd., M.Si, Yunita Trisnawati, S.pd., M.pd, Yuliati S.pd, Ifran., ST, Ice trisnawati A.md Keb, Masrun A.md Kep, dan Kakakku Muammar Iksan, A.md.,SKM (calon Ph.D) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan tantangan namun berkat bimbingan, motivasi, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, segala hambatan dan tantangan yang dihadapi penulis dapat teratasi. Dengan penuh rasa hormat penulis hanturkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya Ucapan terimakasih setinggi – tingginya penulis ucapkan pula :

1. Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Erwin Akib S.Pd.,M.Pd.,Ph.D, sebagai dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Drs. H. Nurdin M.Pd dan Kaharuddin, M.Pd., Ph.D. Ketua jurusan dan sekretaris jurusan Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. DR. Eliza Meiyani, M.Si dan Kaharuddin, M.Pd., Ph.D selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal proposal hingga selesainya skripsi ini
5. Keluarga besarku tercinta tanpa terkecuali yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat Wahyudi Amar, Ilham Maulana, Anto, iqbal, randi, siti salmi dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 Program Studi Pendidikan Sosiologi khususnya kelas B yang telah bersama-sama penulis menjalani masa-masa perkuliahan, atas sumbangan saran dan motivasinya yang telah memberi warna dalam hidup penulis selama ini. Semoga, persaudaraan kita tetap abadi untuk selamanya.
7. Terimakasih kepada saudara-saudara seperjuangan penulis di Germas, Hmw. Ldk Ldm Umi, Hmj Pendsos Unismuh, Hmi STIK Yapma yang sama-sama menggali dan mencari sebuah kedalaman pengetahuannya dalam proses pendewasaan diri, teman teman diorganisasi daerah ardin, anton,wahyul,bang syisbil, bang teguh, tohar dan teman teman SC HMW yang selama 2 tahun mengawal jalannya lembaga, serta Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen di desa sangiang yang

menerima penulis untuk melakukan penelitian hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan semua administrasinya.

8. Adik-adik saya di Himpunan Mahasiswa Wera mulai angkatan 2015 sampai angkatan 2019, terkhususnya kepada adinda Fida, Yesi, wiwin, dan the gang hartaco jaya saya ucapkan terima kasih banyak telah berteman dan saling menganggap saudara

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan sarannya dari berbagai pihak, selama saran dan kritikan tersebut sifatnya membangun, karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Makassar, September 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERJANJIAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Defenisi Operasional.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	13
1. Penelitian Relevan.....	13
2. Rekonstruksi.....	17

3. Ekonomi .....	20
4. Pemberdayaan .....	22
5. Analisis Teori .....	33
B. Kerangka Konsep .....	38

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian .....	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Fokus Penelitian .....	42
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Jenis dan Sumber Data .....	43
G. Teknik Pengumpulan Data.....	44
H. Teknik Analisis Data.....	47
I. Teknik Keabsahan Data .....	49

### BAB IV GAMBARAN DAN HISTORI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Kabupaten Bima.....	52
1. Geografis .....	52
2. Topografi .....	55
3. Hidrologi .....	57
4. Klinitologi.....	58
5. Penggunaan Lahan .....	58
6. Demografi.....	58
B. Potensi Pengembangan Wilayah.....	62

1. Kawasan Strategis Propinsi di wilayah Kabupaten Bima .....	62
2. Kawasan Strategis Kabupaten Bima dengan sudut kepentingan ekonomi.....	63
3. Kawasan strategis dengan sudut Kepentingan Lingkungan Hidup....	64
4. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya.....	64
5. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.....	64
C. Deskripsi Khusus Desa Sangiang sebagai Latar Penelitian.....	65
1. Sejarah Desa Sangiang .....	65
2. Sejarah Pemerintahan Desa Sangiang.....	67
3. Topografi Desa Sangiang.....	69
4. Gambaran Umum Demografis.....	69
5. Rancangan Kerangka Ekonomi Masyarakat Desa.....	72
6. Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	74
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..</b>	
A. Hasil Penelitian.....	76
1. Pemanfaatan Usaha Bumdes Dikalangan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang .....	82
2. Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang.....	87
B. Pembahasan .....	96
1. Pemanfaatan Usaha Bumdes Dikalangan Masyarakat Nelayan.....	99
2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang.....	103

C. Interpretasi Hasil Penelitian.....	107
1. Cara Kerja Teori.....	111
2. Nilai Kebaruan Hasil Penelitian.....	114

**BAB VI PENUTUP**

A. Simpulan.....	116
B. Saran.....	117

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	49
Tabel 2.....	50
Tabel 3.....	51
Tabel 4.....	56
Tabel 5.....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	22
Gambar 2.....	28
Gambar 3.....	38
Gambar 4.....	46
Gambar 5.....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumberdaya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat Provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat Provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah Kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbangsih dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Dari visi dan misi Pemerintah Periode 2015-2019, pembangunan tahun 2015 diarahkan sebagai tahap penguatan fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan, yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berkari dalam ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Program Nawa Cita, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi yakni: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Selain itu, perlu juga digaris bawahi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, bahwa guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, maka dituangkan visi pembangunan, yakni mewujudkan Negara Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.(sumber)

Wilayah pesisir merupakan sebuah kawasan dinamis yang sangat strategis untuk mengembangkan berbagai sektor usaha. Tetapi sayangnya program pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir belumlah tergarap secara proposional. Pemanfaatan sumberdaya kelautan belum di “*managed*” secara tepat guna, yang semakin diperparah timbulnya konflik-konflik kepentingan. Jika ditinjau dari konteks pengembangan masyarakat (*Community Development*), masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir yang hidupnya masih tertinggal. Pada

kenyataannya pembangunan kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan (*Peripheral Sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional. Padahal luas wilayah Indonesia 70% adalah lautan. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 0,3 juta km<sup>2</sup> laut teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan dan 2,7 juta km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (sumber)

Begitu besarnya potensi kelautan yang dimiliki, tapi tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan pandangan yang sangat biasa di lingkungan kehidupan nelayan wilayah pesisir, bahkan jika dibandingkan dengan sektor lain, pertanian, misalnya, nelayan buruh dan nelayan kecil atau lebih dikenal dengan nelayan tradisional dapat digolongkan masyarakat sosial yang miskin.

Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan tersebut. Realitasnya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kondisi alam di wilayah pesisir. Dengan demikian tidak salah jika roda ekonomi yang berjalan sangat bergantung pada bidang perikanan.

Perangkap kemiskinan di wilayah pesisir disebabkan oleh faktor yang sangat kompleks, keterikatan pola pekerjaan, karena pada kenyataannya nelayan membatasi jenis pekerjaan lain, fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, serta akses jaringan perdagangan ikan yang mengeksploitasi nelayan sebagai produsen sehingga memiliki daya tawar yang sangat rendah,

serta yang paling utama, semakin menurunnya tingkat pendapatan dan terus melambungnya jumlah kebutuhan rumah tangga. Dalam rangka pengembangan masyarakat ini diperlukan adanya keterpaduan dan koordinasi para pelaksana pembangunan pada masyarakat pesisir itu sendiri. Secara spesifik permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir adalah di bidang pengetahuan, keterampilan, permodalan, penguasaan teknologi dan manajemen serta peranan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang ada.

Peluang yang dimiliki adalah kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan pelayannya. Sumber daya alam pulau-pulau kecil mempunyai arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi dan preservasi lingkungan, wisata bahari dan kegiatan jasa lingkungan lain yang terkait. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km<sup>2</sup>. Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi pembangunan yang tinggi dengan 85 % kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir dan 90 % hasil tangkapan ikan berasal dari laut dangkal dan pesisir.

Banyak kasus pengentasan kemiskinan yang dilakukan misalnya dalam bentuk pemberian bantuan (yang sebenarnya adalah pinjaman yang harus dibayar oleh nelayan) alat tangkap yang tidak mengacu pada kebutuhan nelayan, melainkan sudah ditentukan dari atas, dan cenderung seragam antar berbagai daerah. Sistem bantuan yang bersifat *Top Down* tersebut mengakibatkan alat

bantuan menjadi kurang efektif. Permasalahan lain yang dialami nelayan adalah terkait dengan pemasaran hasil tangkapan.

Guna mengatasi persoalan masyarakat nelayan tersebut maka diperlukan suatu model kemitraan yang tepat sehingga dapat membantu dalam memperoleh informasi pasar dan teknologi serta akses ke lembaga keuangan. Jaringan lembaga kemitraan dapat dibentuk dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara kelompok usaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar maupun dengan pemerintah. Kemitraan usaha perlu dilakukan dengan tujuan agar kelompok masyarakat nelayan dapat memasarkan hasil tangkapannya dengan harga yang wajar dan pantas sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Hal demikian juga dialami oleh nelayan di Desa Sangiang, Kabupaten Bima. Selama ini, nelayan berusaha melakukan terobosan guna meningkatkan pendapatan dengan mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapan, serta meminjam modal untuk pengadaan alat tangkap. Akan tetapi, upaya tersebut justru menyebabkan nelayan terjebak pada ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan diri pada posisi tawar yang lemah.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan

mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Desa di sebutkan BUMDes yaitu modal sebagian besar dimiliki oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pengurus BUMDes.

Namun permasalahan yang ada di Desa sangiang yaitu BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dikarenakan hanya bidang

simpan pinjam yang masih berjalan, untuk bidang lainnya belum berjalan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Menyadari pentingnya peran BUMDes untuk pemberdayaan masyarakat khususnya pemilik usaha di desa maka perlu diadakan pembahasan mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Keberadaan BUMDes desa Sangiang diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes, sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.

Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi. Namun, di Desa Sangiang masih mengalami beberapa kendala di dalam pemberdayaan BUMDes, diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMDes.

Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa hal ini tercantum dalam Undang-Undang No.12/2008. Sehingga

BUMDes di bangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk memberdayaan masyarakat desa. Masyarakat ikut berperan dalam perencanaan, dan pelaksanaan BUMDes.

Dengan demikian masyarakat nelayan desa Sangiang sangat berharap ditinjau kembali Kebijakan sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan kelembagaan) dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan yang “tertinggal” perlu direkayasa ulang terutama yang berkaitan dengan bidang sistem informasi manajemen maupun sistem informasi akuntansi, karena perkembangan kehidupan nelayan di wilayah pesisir sangat lambat, yang sebagian besar adalah kelompok miskin, bahkan kelompok yang paling miskin, dengan karakteristik dan permasalahan yang plural, antara lain: (1) Budaya terbuka dan infrastruktur yang terbatas, (2) Sumber kehidupan tergantung pada sumber daya alam, (3) Aktivitas ekonominya sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim, (4) Peran pasar sangat menentukan dalam berkembangnya aktivitas masyarakat.

Faktor-faktor di atas membawa masyarakat nelayan tidak memperoleh pendapatan yang memadai, di sisi lain kebijakan sosial ekonomi tidak memberikan solusi nyata, yang akhirnya berdampak pada kemiskinan. Rekayasa pengembangan masyarakat nelayan terkait dengan aspek kelembagaan harus berlandaskan pada tiga pilar, yaitu : (1) Kekuatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir serta kemampuan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. (2) Pemerintah memberikan kesempatan dan jaminan legal formal. (3) Pihak swasta termasuk pengusaha-pengusaha yang terkait dalam

wadah kerjasama yang menguntungkan nelayan yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Nelayan di Desa Sangiang dapat disebut sebagai nelayan tradisional. Nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan teknologi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Dalam arti hasil tangkapan yang dijual lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan, dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha. Hal ini membuat masyarakat desa Sangiang harus memiliki pemahaman yang lebih baik agar masalah sosial yang dihadapi dapat diatasi secara efisien dan efektif.

Pada kondisi tersebut, berakibat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dampaknya belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Masalah yang terjadi adalah sebaliknya, di mana lingkaran setan kemiskinan terus terjadi di berbagai wilayah pesisir. Terbatasnya akses modal disebabkan karena tidak ada satu pun lembaga keuangan dalam hal ini bank yang ada di Desa Sangiang, baik swasta maupun pemerintah. Faktor lain adalah tidak adanya jaringan kerjasama dengan *stakeholder* yang dapat membantu pengembangan baik dari segi pengetahuan maupun teknologi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan BUMDes pada masyarakat nelayan yang berada di Desa Sangiang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Rekonstruksi Sosial Ekonomi (Studi BUMDes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima).”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah disusun di atas, maka dapat dirumuskan tentang permasalahan apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pemanfaatan BUMDes dikalangan masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?
2. Bagaimanakah rekonstruksi sosial ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan usaha Bumdes dikalangan masyarakat Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui Rekonstruksi Sosial Ekonomi dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang tertarik membahas mengenai pemberdayaan masyarakat Nelayan melalui bumdes yang berada di Desa Sangiang.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk objek penelitian, yakni di Kecamatan Wera, Khususnya Desa Sangiang dijadikan sebagai acuan untuk masyarakat pada bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan melalui bumdes. Untuk peneliti sendiri, dapat mengembangkan pengetahuan tentang sosiologi khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan.
- b. Untuk referensi, yakni dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Rekonstruksi adalah membangun atau pengembalian sesuatu berdasarkan kejadian semula.
2. Sosial Ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas perekonomiannya.
3. Pembedayaan adalah sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan ,memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.
4. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki langsung oleh desa. BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian Desa Sangiang.
5. Masyarakat Nelayan adalah masyarakat yang hidup di pesisir pantai yang mayoritas mata pencahariannya sebagi nelayan.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Penelitian Relevan**

Dalam kajian pustaka ini diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah sebagai pembandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini, baik sebagai referensi, pembandingan maupun sebagai dasar pemilihan topik penelitian. Berikut beberapa penelitian relevan tentang topik pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan Eva Septriana (2012), dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi LSM Mitra Bentala dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan kawasan hutan mangrove Pulau Pahawang serta kendala-kendala yang dihadapinya. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasilnya adalah strategi LSM Mitra Bentala yang terdiri dari upaya pelestarian hutan mangrove Pulau Pahawang, peningkatan kapasitas kelembagaan BPDPM, peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan mangrove dirasa kurang maksimal karena pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hanya berfokus pada upaya pencapaian kelestarian hutan

mangrovenya saja, sedangkan pencapaian kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya sebagian besar pendapatan masyarakat yang masih terbilang rendah yaitu berkisar Rp.600.000,- perbulan, jauh dibawah standar kebutuhan hidup layak Provinsi Lampung yang saat itu berkisar Rp.1008.109,- perbulan. Hal tersebut disebabkan faktor internal organisasi sendiri yaitu minimnya kualitas SDM organisasi serta masalah pendanaan, sedangkan dari faktor eksternal yaitu kurangnya responsf pemerintah terhadap potensi pulau dan pengelolaan hutan, kondisi SDM lokal dan fasilitas kegiatan yang kurang memadai. Penelitian ini mengilhami peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pemberdayaan masyarakat yang terfokus pada peningkatan ekonomi masyarakatnya.

- b. Penelitian selanjutnya tentang strategi pengembangan ekowisata di Pulau Sebesi Kabupaten Lampung Selatan oleh Helmi Ady (2010). Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi pariwisata alam (ekowisata) di Pulau Sebesi secara komprehensif melalui proses partisipatif, dengan memperhatikan sensitivitas ekosistem, potensi sumberdaya alam, dan optimalisasi peranserta masyarakat dalam upaya penyusunan strategi pengembangan dengan pola pengembangan keberlanjutan (sustainable development). Pendekatan yang digunakan adalah analisis melalui Matriks SWOT dan dilanjutkan dengan menentukan faktor kunci analisis SWOT melalui *In-dept interview* serta *perhitungan Quantitative Strategic Planing*

*Matrix* (QSPM) untuk penentuan skala prioritas pelaksanaan strategisnya, serta melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil dari pengumpulan dan pengolahan data diperoleh masing-masing 5 (lima) elemen faktor kunci, 8 (delapan) elemen alternative strategi, dan 5 (lima) elemen alternative strategi terpilih dengan urutan prioritas utama dalam pelaksanaannya setelah dihitung dengan QSPM adalah sebagai berikut: (1) Kerjasama kemitraan dalam pengembangan ekowisata baik sarana-prasarana, promosi, peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pelesatarian alam (Skor 6,85), (2) Mengemas lebih atraktif atraksi wisata dengan mengedepankan Reputasi Gunung Krakatau (Skor 6,7), (3) Optimalisasi penggunaan IT untuk merebut pasar (Skor 6,7), (4) Kooperatif dengan pihak pesaing melalui penawaran produk wisata alam yang berbeda (Skor 6,45), (5) Koordinasi dan kerjasama semua pihak dalam penyelesaian konflik tanah dan menjaga keamanan bersama (Skor 5,8). Penelitian inipun turut mengilhami penulis melakukan penelitian sejenis yakni tentang pengembangan ekowisata, akan tetapi melalui pendekatan yang berbeda, yaitu analisis melalui *matriks Logframe* (kerangka kerja).

- c. Selain penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, terdapat pula penelitian tentang peranan LSM Mitra Bentala sebagai pendamping dalam upaya mensejahterakan masyarakat di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan oleh Fanie Wirha Kesuma (2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan hasil dari proses pendampingan

masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Pendekatan yang digunakan ialah analisis peran (LSM), dengan hasil dari penelitian ini adalah (1) Proses pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala memberikan pengaruh positif yang sangat besar dalam perubahan pola pikir dan pola kehidupan masyarakat yang berkaitan erat dengan lingkungannya; (2) Adanya sebuah perubahan cara pandang masyarakat tentang bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam pesisir secara adil, bijak dan juga memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan agar terhindar dari bencana ekologis yang akan merugikan manusia. Selanjutnya penelitian inipun turut mengilhami penulis dalam proses pemilihan topik penelitian, di mana LSM Mitra bentala mempunyai peran yang kuat dalam pendampingan masyarakat Pulau Pahawang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya melalui program-program yang digulirkan, maka organisasi tersebut harus mampu menyusun kerangka program kerja yang strategis guna memastikan program-program tersebut mengacu dan selalu bertujuan untuk mencapai visi dan juga mempermudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian program.

## 2. Rekonstruksi Sosial

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masalalu, hingga pada konsep sipemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktur adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Rekonstruksi merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Rekonstruksi dipelopori oleh George S. Count dan Harold Rugg pada tahun 1930, ingin membangun masyarakat baru, masyarakat pantas dan adil.

Aliran ini berpendapat bahwa sekolah harus mendominasi atau mengarahkan perubahan atau rekonstruksi pada tatanan sosial saat ini. Theodore Barmeld (1904-1987). Mendasarkan filsafatnya pada dua premis dasar pada pasca era Perang Dunia II: (1) kita tinggal dalam suatu periode krisis hebat, yang paling nyata pada fakta bahwa manusia saat ini telah mampu menghancurkan peradapan dalam semalam, dan (2) umat manusia juga memiliki potensi intelektual, teknologi

dan moral untuk menciptakan suatu peradaban dunia “kesejahteraan, kesehatan dan kapasitas rumah“ (Brameld 1969:19).

Secara filosofis, filsafat rekonstruktivisme terdiri dari dua buah pemikiran, yaitu (1) Masyarakat memerlukan rekonstruksi atau perubahan, (2) perubahan sosial tersebut melibatkan baik perubahan pendidikan dan penggunaan pendidikan dalam merubah masyarakat. Menurut Hamalik (2007: 62) premis utama dari filsafat ini adalah untuk menjadikan sekolah sebagai agen perubahan (*change agents*) dalam rekonstruksi sosial.

Para filosof rekonstruktivisme mempunyai sikap terhadap perubahan tersebut bahwa mereka mendukung individu untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan pada saat ini. Aliran filsafat rekonstruktivisme dapat menjadi alat yang reponsif karena saat ini kita dihadapkan pada sejumlah permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan ras, kemiskinan, peperangan, kerusakan lingkungan dan teknologi yang tidak manusiawi yang membutuhkan rekonstruksi atau perubahan dengan segera. Para individu di abad 20 kebingungan tidak hanya oleh perubahan yang telah terjadi, tetapi juga dengan kemungkinan perubahan pada masa yang akan datang yang harus dibuat jika kita hendak mengatasi masalah-masalah yang ada. Sedangkan ada banyak orang pintar dan mempunyai pandangan yang berpikir dan menegembangkan tentang perubahan sosial yang belakangan ini disebut dengan filsafat rekonstruktivisme.

*Reconstructionism* budaya salah satu filosofi pendidikan yang lebih modern, tajam kontras dengan posisi konservatif Esensialisme dan Perennialism, yang

dianggap oleh *reconstructionists* sebagai teori reflektif yang mencerminkan mewarisi pola sosial dan nilai-nilai. Para *reconstructionists* menegaskan sekolah dan pendidik harus berdasarkan kebijakan dan program yang akan membawa reformasi tatanan sosial. Guru, kata mereka, secara sengaja harus menggunakan kekuasaan mereka untuk memimpin kaum muda dalam program-program ahli teknik sosial dan reformasi.

*Reconstructionists* budaya atau sosial mengklaim sebagai penerus sejati Eksperimentalisme John Dewey. Walaupun ia tidak pernah bergabung dengan *reconstructionists* Dewey yang menekankan perlunya merekonstruksi pengalaman baik pribadi dan sosial. Dia juga menekankan sifat-sifat sosial pendidikan. Dewey menekankan pada rekonstruksi pengalaman, *reconstructionists* menekankan pada rekonstruksi pengalaman sosial dan menerapkannya pada rekonstruksi warisan budaya.

Meskipun *reconstructionists* sosial seperti William O. Stanley dan Theodore Brameld berbeda pada aspek-aspek tertentu dari posisi filosofis mereka, mereka dan *reconstructionists* lainnya menyepakati dasar-dasar seperti: (1) semua filsafat, termasuk pendidikan, secara budaya didasarkan dan tumbuh dari pola budaya spesifik yang dikondisikan dengan hidup pada waktu tertentu di tempat tertentu, (2) budaya, sebagai proses dinamis, berkembang dan berubah, (3) manusia dapat membentuk dan memoles kulturenya sehingga dapat dioptimalkan bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia.

*Reconstructionists* sosial melihat zaman sekarang sebagai zaman yang dilanda krisis budaya yang parah yang merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan manusia untuk merekonstruksi nilai-nilai dalam hal persyaratan kehidupan modern. Manusia telah memasuki zaman teknologi dan ilmu pengetahuan modern dengan seperangkat nilai-nilai yang berasal dari masa lalu desa pra-industri. Untuk mengatasi krisis manusia perlu meneliti budaya dan untuk menemukan di dalamnya unsur-unsur yang layak yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan krisis saat ini. Jika manusia meneliti warisan perencanaan kearah perubahan dan melaksanakan rencananya, ia akan membangun sebuah tatanan sosial baru.

### **3. Ekonomi.**

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *economy*. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikonomike* yang memiliki arti pengelolaan rumah tangga. Ekonomi adalah suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya masyarakat yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan pertimbangan kemampuan, usaha dan keinginan masing-masing.

#### **a. Keterkaitan Ekonomi dan Sosiologi,**

Smelser dan Swedberg (2005) mengemukakan definisi sosiologi ekonomi dengan mengadopsi pendapat Weber maupun Durkheim, bahwa sosiologi ekonomi merupakan sub disiplin sosiologi yang memfokuskan bidang studi

pada bagaimana aktor atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Definisi di atas menjelaskan dua terminology tentang fenomena ekonomi, dan pendekatan sosiologis. Fenomena ekonomi yang menjadi fokus perhatian adalah mengenai cara aktor memenuhi kebutuhan, dan di dalamnya terkandung aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi sumberdaya yang pada dasarnya bermuara pada kesejahteraan aktor. Sedangkan pendekatan sosiologisnya meliputi kerangka acuan, variabel dan indikator, serta model-model yang digunakan sosiolog dalam memahami ataupun menjelaskan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, terdapat perbedaan pendekatan ataupun cara pandang dari sudut ekonomi dan sosiologi ekonomi terutama dalam memandang aspek produksi, distribusi dan pertukaran, serta konsumsi sebagai komponen kegiatan ekonomi masyarakat.

#### b. Hubungan Ekonomi dan Masyarakat

Pusat perhatian dari kajian ekonomi adalah pertukaran ekonomi, pasar dan ekonomi. Sedangkan masyarakat dianggap sebagai “sesuatu yang di luar” dia dipandang sebagai sesuatu yang telah ada (given). Oleh sebab itu, sosiolog tidak terbiasa melihat kenyataan dengan melakukan *ceteris paribus* terhadap faktor-faktor yang dipandang berpengaruh terhadap suatu kenyataan sosial. Tetapi sebaliknya, sosiolog terbiasa melihat kenyataan secara holistik, melihat kenyataan saling kait mengait antar berbagai faktor. Dengan demikian, sosiologi ekonomi selalu memusatkan perhatian pada:

- 1) Analisis sosiologis terhadap proses ekonomi, misalnya proses pembentukan harga antara pelaku ekonomi, proses terbentuknya kepercayaan dalam suatu tindakan ekonomi, atau proses terjadinya perselisihan dalam tindakan ekonomi.
- 2) Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, seperti hubungan antara ekonomi dan agama, pendidikan, stratifikasi sosial, demokrasi atau politik.
- 3) Studi tentang perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat. Contohnya semangat kapital budaya pada masyarakat nelayan.

#### **4. Pemberdayaan.**

Telah lama disadari bahwa usaha pembangunan masyarakat bukan semata mengintriduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk belunggu eksploitasi. Itu berarti bahwa kegiatan pembangunan tidak hanya menyentuh persoalan ekonomi dan teknologi, tetapi lebih dari itu adalah persoalan harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks inilah, kegiatan membangun masyarakat kemudian terkait erat dengan memberdayakan masyarakat karena disamping memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan inisiatif.

Sudah banyak bukti yang memperlihatkan bahwa ketika inisiatif itu hanya dilakukan oleh pemerintah dan tidak pernah diletakkan pada masyarakat, perjalanan pembangunan diwarnai oleh berbagai bentuk monopoli dan manipulasi.

a. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu konsep utama dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial pada era 1990-an hingga saat ini. Konsep Pemberdayaan Masyarakat ini mendapatkan penekanan lebih khusus, terutama pada model intervensi Pengembangan Masyarakat. Sebagai Suatu konsep, Pemberdayaan Masyarakat mempunyai beberapa definisi. Berikut beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, yaitu:

*Pertama*, Payne (1997) mengemukakan bahwa suatu Pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna: (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dalam lingkungannya).

*Kedua*, Shardlow (1998) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan

sebagai suatu gagasan tidaklah jauh dengan gagasan.. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk haridepanya

*Ketiga*, Sementara, Ife (2006) melihat pemberdayaan secara singkat sebagai “upaya untuk meningkatkan daya dari kelompok yang kurang beruntung.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, upaya pemberdayaan masyarakat dapat berbeda kelompok sasaran dan tujuan pemberdayaan sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Tujuan pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang pendidikan ataupun bidang sosial, misalnya, tujuan pemberdayaan bidang ekonomi adalah agar kelompok sasaran dapat menggali potensinya yang dimiliki untuk mengatasi masalah dan tantangan kehidupan yang ia hadapi. Sedangkan tujuan pemberdayaan di bidang sosial, misalnya agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan peran dan tugasnya.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti

pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8) ). Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan muncul sebagai strategi dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Konsep ini muncul dari dua yakni antara kegagalan dan harapan. Kegagalan yang di maksudkan adalah gagalnya model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif pembangunan yang mengutamakan nilai-nilai

demokrasi, persamaan gender, persamaan antara generasi, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Konsep pemberdayaan pada awalnya muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang menepatkan negara terlalu domino dalam melaksanakan pembangunan. Posisi sentral Negara terlihat dari mulai perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Konsep pemberdayaan ini berasumsi bahwa pembangunan akan berjalan lancar apabila masyarakat di beri kesempatan atau berhak mengelolah sumber daya yang ada untuk kepetingan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Menurut Kartasasmita (1996 ) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat pesisir adalah Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.

b. Pemberdayaan Masyarakat sebagai suatu Program dan Proses

Di samping dapat dilihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program di mana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya program pemberdayaan ekonomi dengan jangka waktu 1-2 ataupun 5 tahun. Konsekuensi dari hal ini, bila program itu selesai maka dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Hal seperti ini banyak terjadi dengan sistem pembangunan berdasarkan proyek yang banyak terjadi dengan sistem pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, dimana proyek yang satu dan yang lainnya kadangkala tidak berhubungan, bahkan tidak saling mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh bagian yang lain, meskipun itu dalam satu lembaga yang sama, sedangkan pada beberapa organisasi non pemerintah kegiatannya tidak jarang juga terputus karena telah berakhirnya dukungan dana dari pihak donor.

Sementara itu kelompok yang lain ada pula yang melihat pemberdayaan sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*). Untuk

melihat apa yang dimaksud dengan pemberdayaan sebagai *on going process*, mungkin dapat dilihat apa yang dikemukakan oleh Hogan (2000: 13) yang melihat proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa. Hal ini juga berlaku pada suatu masyarakat, di mana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

#### c. Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan

Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan konsep partisipasi ini, Mikkelsen (2005) melihat bahwa konsep partisipasi landasan teoritis, dan dengan kemungkinan untuk diterapkannya (*practical applicability*) dalam kaitan dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Istilah partisipasi dan partisipatoris, menurut Mikkelsen (2005) biasanya digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, seperti berikut, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

- 2) Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima berbagai proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah suatu proses khusus aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang di tanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu.
- 4) Partisipasi adalah proses menjembatangi dialog komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan evaluasi staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat.
- 5) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat.
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan dan diri sendiri.

Chambers (2002) melihat istilah partisipasi sering kali digunakan dalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Partisipasi digunakan sebagai lebel kosmetik. Kata partisipasi sering digunakan agar proyek yang diusulkan terlihat lebih cantik, sehingga lembaga donor maupun pihak pemerintah akan mau membiayai protek tersebut.

2) Partisipasi digunakan untuk menggambarkan praktik mengoptimasi.n dalam hal ini, partisipasi antara lain digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga di tingkat lokal dan mengurangi pembiayaan proyek.

3) Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan.

Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar dari perkembangan pemikiran tentang pendekatan partisipatif dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas. Dimana, salah satu inti utama dari diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah belaka. Suatu komunitas telah mencapai taraf di mana dia berada saat ini, sebenarnya telah melalui suatu proses evolusi yang cukup panjang. Hampir setiap komunitas telah mengembangkan dan mempunyai kearifan lokal termasuk didalamnya adalah menghargai kebudayaan, pengetahuan dan teknologi lokal, yang mungkin dikembangkan sejalan dengan tumbuhnya permasalahan dan tantangan yang mereka hadapi. Setiap komunitas mengembangkan metode adaptasi yang relatif canggih dalam rangka mengelola lingkungannya mereka tidak dapat dikatakan sebagai makhluk bodoh. Hal ini juga terjadi pada suku terasing. Mereka telah berusaha dengan segala daya uapayanya untuk dapat hidup dengan nyaman di lingkungan di mana ia berada. Meskipun kadangkala hal yang mereka lakukan kurang dapat diterima oleh logika

pada awalnya, tetapi biasanya ada penjelasan mengapa mereka melakukan hal itu.

Berdasarkan uraian di atas, partisipasi yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah adanya keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, pengidentifikasian potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan juga keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan.

Sebaliknya, bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan dan hanya bersikap pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta), masyarakat cenderung akan menjadi lebih dependen (tergantung) pada pelaku perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin meningkat.

Terkait, dengan bagaimana melihat apakah suatu komunitas sudah berpartisipasi dengan baik atau masih dalam tahap awal partisipasi, Ife (2006) mengutip pandangan dari Bickman, Rifkin dan Shretra (1989) melihat bahwa ada lima parameter yang bisa dijadikan tolak ukur untuk membandingkan

partisipasi berdasarkan prosesnya (dan bukan sekedar dari aktifitas yang melibatkan warga), yaitu: *pertama*, proses pengidentifikasian kebutuhan, *kedua*, kepemimpinan, *Ketiga*, organisasi, *Keempat*, manajemen, *Kelima*, kemampuan memobilisasi sumber daya.

d. Pentingnya Pemberdayaan Kelompok Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Nelayan

Kompleksnya permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan semakin membuat masyarakat nelayan harus menghadapi berbagai macam permasalahan yang kompleks.

Usaha untuk meningkatkan produksi dibidang perikanan bagi masyarakat nelayan tentu tidak akan terlepas dari pemilikan alat tangkap. Karena dengan tersedianya alat tangkap yang memadai tentu akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas. Masyarakat nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya terutama dalam hal melaut masih ada yang menggunakan alat tangkap secara tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak turun temurun. Hal ini ditandai dengan alat transportasi dengan menggunakan perahu sampan dengan bantuan alat dayung, kail yang digunakan untuk memancing sangat minim, serta masih mempertahankan tradisi dalam menangkap ikan. Keterbatasan peralatan yang sangat sederhana tersebut membuat nelayan

memperoleh hasil tangkapan sangat sedikit bahkan seringkali tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa sistem peralatan yang dimiliki oleh masyarakat nelayan sebagian masih menggunakan dayung dan perahu sampan serta ada sebagian nelayan yang sudah mulai menggunakan perahu besar seperti pamo, pelang yang memakai motor tempel.

Masyarakat nelayan secara umum termasuk dalam kategori masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah yang paling sering mengalami penderitaan sebagai akibat dari ketidakberdayaan dan kerentanannya. Berbagai kajian yang telah dilakukan menemukan, bahwa para nelayan (tradisional) bukan saja harus berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim paceklik ikan yang panjang, tetapi lebih dari itu mereka juga sering harus berhadapan dengan berbagai tekanan dan bentuk eksploitasi yang muncul bersamaan dengan berkembangnya proses modernisasi di sektor perikanan (Suyanto dkk., 2005). Berbagai kajian oleh beberapa pakar mengindikasikan bahwa kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat nelayan berada pada posisi yang sangat lemah bahkan sebagian besar dari mereka masih tergolong sebagai nelayan buruh atau nelayan-nelayan kecil yang hidup dalam lingkaran kemiskinan.

## **5. Analisis Teori**

### **a. Perspektif Teori Fakta Sosial**

Fakta sosial dinyatakan sebagai barang sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan seluruh ilmu

pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia. Fakta sosial harus diteliti di dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lainnya. Pokok persoalan yang harus menjadi pusat perhatian penyelidikan menurut sosiologi menurut paradigma ini adalah: fakta-fakta sosial. Secara garis besarnya fakta sosial terdiri atas dua tipe. Masing-masing adalah struktur sosial, dan pranata sosial. Sifat dasar serta antar hubungan dari fakta sosial inilah yang menjadi sasaran penelitian sosiologi menurut paradigma fakta sosial.

#### b. Perspektif Teori Perubahan Sosial

Semua orang bersepakat bahwa kehidupan sosial tidaklah statis, melainkan selalu berubah-ubah secara dinamis. Tetapi tidak semua orang mempunyai kesepakatan sama dalam mengartikan perubahan sosial. Malah konsep perubahan sosial sempit diberi makna intuitif dan sebagai suatu mitos belaka.

Bersumber pada perbedaan orientasi formal di atas maka kemudian berkembang beragam pendapat di antara sosiolog dalam melihat orientasi analisis dan tema substantif perubahan sosial. Yang perlu diperhatikan adalah kenyataan bahwa setiap masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan termasuk pada masyarakat primitif dan masyarakat kuno sekalipun.

Auguste Comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu organisme yang terintegrasi berkat adanya konsensus. Kondisi ini memungkinkan

masyarakat selalu dalam kondisi harmonis yang di perolehnyaberkat spontanitas hubungan fungsional antar subsistemnya.

Perubahan Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai proses dimana dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terdapat dalam ukuran waktu tertentu. Sistem sosial merupakan sejumlah kegiatan (Sejumlah Orang) orang hubungan timbal baliknya kurang lebih bersifat konstan. Hubungan sosial inilah memperlihatkan adanya keajengan-keajengan sehingga kemudian sebagai menampakkan sebagai suatu struktur.

Terlihatnya hubungan antara orang atau kegiatan yang tertata kemudian juga berarti menunjukkan adanya struktur sosial dimana di dalamnya dapat di identifikasikan. Distribusist atu status dan peranan-peranannya yang hirarkis dengan segala konsekuensinya. Pola perubahanya itu linear, siklus, dan gabungan beberapa pola.

Dimensi perubahn sosial yaitu struktural, kultural, dan interaksional. Dimensi struktural menampakkan diri pada perubahan-perubahan dalam status dan peran. Perubahan status dapat didefinisikan dari ada tidaknya perubahan pada peran, kekuasaan, ototritas, fungsi, integritas, hubungan antar status, arah kominkasi, dan seterusnya. Sementara itu, perubahan dalam dimensi dalam kultural bias di artikan dan diperhatikan ada tidaknya perubahan dalam budaya material (teknologi) dan non material (ide, nilai, peraturan, norma, kaidah sosial, yang menjadi *collective consciousness* di antara warga.

Perubahan dalam dimensi interaksional lebih menunjuk pada konsekuensi logis dari nyataadanya perubahan dari kedua dimensi lainnya. Misalnya interaksi sosial sebagai konsekuensi dari perubahan sistem dalam dimensi struktural, bias juga sebagai akibat dari perubahan sistem nilai dan kaidah sosial. Yang jelas, ketiga dimensi di atas ibarat dua sisi mata uang yang sama hanya persoalan dari tataran dimensi mana perubahan dijelaskan.

Perubahan acapkali di rancukan dengan konsep konsep lain, seperti pergeseran sosial, pembangunan, evolusi sosial, revolusi sosial, kemajuan, pertemuan.

#### c. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Teori ini sering disebut juga perspektif fungsionalisme, dicetuskan oleh Emile Durkheim. Durkheim banyak mengkaji tentang tatanan sosial dan bagaimana masyarakat dapat hidup harmonis. Fungsionalisme fokus pada struktur sosial yang levelnya makro. Beberapa tokoh sosiologi yang terpengaruh oleh teori fungsionalisme Durkheim diantaranya, Talcott Parsons dan Robert K. Merton.

Fungsionalisme melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat, dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing

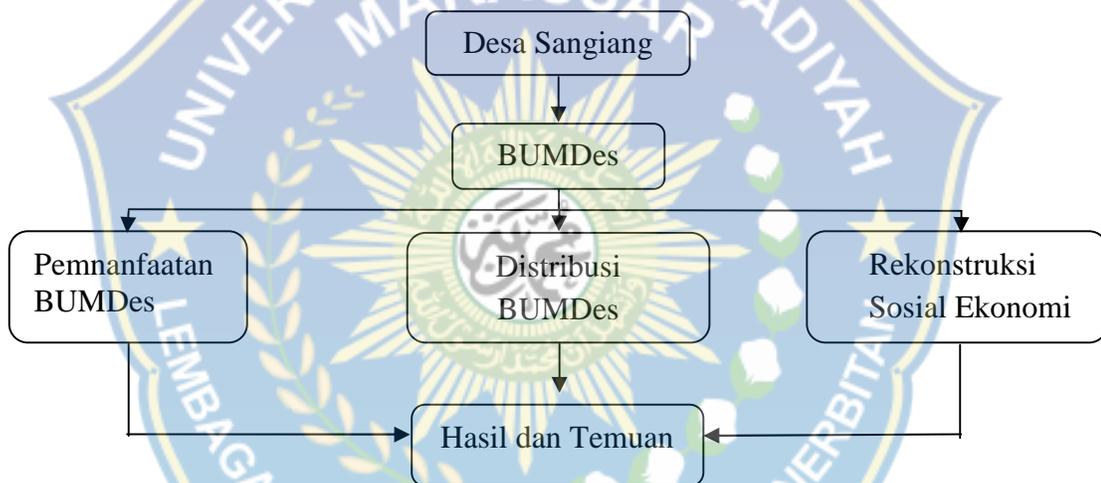
komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya.

d. Modal sosial sebagai konsep atau teori social

Sudah banyak dikaji para ahli dan dijadikan dasar indicator dalam mengkaji suatu proses pembangunan yang berfokus pada kinerja kelompok. Menurut Shahra (2003) pertama kali pengertian modal sosial digulirkan oleh Lyda Judson Hanifan (1916) yang diartikan sebagai kiasan bukan dalam arti material, yaitu aset atau modal nyata yang penting dalam hidup masyarakat, termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang serta antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Selanjutnya Pierre Bourdieu (1986) menjelaskan modal sosial merupakan aspek sosial dan budaya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dilembagakan, yaitu keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Kemudian Coleman (1999) mengartikan modal sosial adalah kewajiban dan harapan, saluran-saluran informasi dan norma-norma sosial. Merupakan kemampuan kerja bersama menghadapi seluruh permasalahan, untuk mencapai tujuan dalam kelompok atau organisasi. Komunitas dibangun oleh modal sosial melalui pengembangan hubungan sosial aktif, partisipasi demokrasi dan penekanan dari rasa memiliki komunitas dan kepercayaan (Fukuyama, 1995)

## B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengistilahkan unsur-unsur yang terkandung didalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara konsep-konsep tertentu. Sehingga pada penelitian dan pembahasan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Sangiang Kabupaten Bima. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan alur dari kerangka konsep tersebut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan gambar peta konsep di atas kita dapat menarik peta pembahasan yang akan diteliti adalah Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Sangiang. Masyarakat sebagai objek utama dalam hal ini sehingga dilihat dalam Realitas Sosial asyarakat. Kemudian pemberdayaan Masyarakat Nelayan ini perlu dilakukan penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian sosial yang dianalisis secara kualitatif, yang menurut Miles dan Huberman (2009: 15) merupakan yang menghasilkan data yang muncul berwujud kata-kata bukan angka, data itu mungkin telah dikumpulkan dengan aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas. Dengan kata lain penelitian ini sangat bergantung pada informasi yang didapat saat melakukan penelitian di lapangan.

Menurut Miles dan Huberman (2009: 1-2), penelitian kualitatif merupakan sumber dari deskripsi luas dan berlandas kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat, dalam lingkungan pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Terlebih lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya untuk membentuk

kerangka teoritis baru, data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, instrumennya adalah peneliti sendiri, berfungsi sebagai penetap fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data dengan mencatat apa yang terjadi, melakukan analisis data terhadap berbagai kejadian yang ditemukan di lapangan, menafsirkan data dan membuat kesimpulan penelitian.

Kemudian penelitian ini dapat dikatakan bahwa penelitian ini bermaksud untuk memahami rekonstruksi sosial ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan desa sangiang dengan penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan atau melukiskan masalah dan kondisi ekonomi masyarakat nelayan sehingga perlu di rekonstruksi sosial ekonomi dengan BUMDes sebagai solusinya, tentunya kita berharap penelitian ini memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan desa sangiang sehingga pemberdayaan masyarakat terjadi lewat BUMDes.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Desa Sangiang merupakan desa yang berada Pesisir laut yang di kelilingi oleh lautan dan gunung, sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sangiang adalah desa yang memiliki letak strategis yang berada di ujung paling timur pulau Sumbawa, perekonomian masyarakat sangiang yang berada di kecamatan wera kabupaten bima ini

sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan petani, maka dari itu sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada laut bagi nelayan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidupnya dengan segala potensi laut untuk dimanfaatkan oleh nelayan desa sangiang.

Tak hanya kekayaan lautnya desa sangiang juga banyak kebudayaan beragam mulai tari-tarian, ritual kalondo lopi, dan beberapa ritual lainnya, inilah yang menjadi keistimewaannya

## 2. Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan ke-					
	I	II	III	IV	V	VI
Pengajuan Judul						
Survey Pendahuluan						
Seminar Proposal						
Penelitian						
Penyusunan Hasil Penelitian						
Seminar Hasil						

Gambar 2. Jadwal Penelitian

## C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan berbagai sumber informasi yang dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa orang yang dianggap bisa memberikan data atau informasi yang benar terhadap masalah yang diteliti.

Penentuan informan dalam kualitatif yang digunakan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2016: 218) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu maksudnya, informan yang diambil oleh peneliti adalah orang-orang yang dianggap betul-betul mengetahui dan ikut terlibat dalam lingkungan BUMDes dan masyarakat. Informan penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu:

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini Kepala Desa dan Sekertaris Desa. Peneliti memperkirakan informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 2 orang.
2. Informan Ahli yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, dalam hal ini ketua BUMDes, Bendahar dan Kabid-kabid BUMDes, serta masyarkat nelayan desa sangiang. Peneliti memperkirakan informan ahli dalam penelitian ini berjumlah tiga orang.
3. Informan Biasa Tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti dalam hal ini adalah warga desa Sangiang. Peneliti memperkirakan informan biasa dalam penelitian ini berjumlah tiga orang.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan hal inti yang akan diteliti. Dalam hal ini, fokus penelitian pada penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan usaha, proses

pendistribusian Bumdes dan Rekonstruksi sosial ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan desa Sangiang

### **E. Instrument Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam memperoleh data penelitian ialah berupa lembar observasi, panduan wawancara, serta catatan dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini.

1. Lembar observasi, berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Panduan wawancara merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan peneliti yang akan dijawab melalui proses wawancara.
3. Catatan dokumentasi adalah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguatan data observasi dan wawancara yang berupa gambar, arekaman wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitin.

### **F. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada obyek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disipkan sebagai alat pengumpulan data.

## 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan dan diharapkan, membantu member keterangan sebagai pelengkap dan bahan pembanding (Bungin, 2001:129). Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara atau observasi sedangkan data sekunder adalah data yang dapatkan dari hasil telaah buku referensi atau dokumentasi.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

#### 1. Observasi.

Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data dalam penelitian ini dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap obyek yang diteliti. Menurut James dan Dean dalam Paizaluddin dan Ermalinda (2013: 113), observasi adalah mengamati (*watching*) dan mendengar (*listening*) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang menghasilkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri atau tunggal yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Selain itu penelitian Deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan yang berkaitan dengan bumdes sebagai pemberdayaan masyarakat nelayan desa sangiang.

## 2. Wawancara.

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Husaini, 2011: 55). Peneliti melakukan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini yang meliputi pengurus Desa, para pengurus BUMDes dan masyarakat nelayan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara (Interviewer guide), berisi tentang pokok-pokok pertanyaan yang telah direncanakan dan dianggap penting untuk mendapatkan data penelitian sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan peneliti sebelumnya, yaitu tentang rekonstruksi sosial ekonomi studi bumdes pemberdayaan masyarakat nelayan desa sangiang. Bagaimana

latar belakang adanya BUMDes, tujuan BUMDes, bahkan bagaimana pengaruh BUMDes pada masyarakat desa, sejauh mana BUMDes hadir sebagai usaha milik desa, apakah efektif tidak BUMDes ini sebagai usaha milik desa, hal-hal itulah yang peneliti ungkap.

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yang bersifat luwes, dimana susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara dilakukan, pengumpulan data dengan teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan baik itu dari subjek maupun informasi yaitu Aparat Desa, BUMDes Desa, dan Tokoh Masyarakat dan masyarakat yang ada di Desa Sangiang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berupa dokumen, baik dokumen tertulis maupun hasil gambar. Menurut Lexy J. Moleong dalam Paijaluddin dan Ermalinda (2013: 135), dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Data yang diperoleh dari dokumen ini biasa digunakan untuk melengkapi bahkan memperkuat data dari hasil wawancara.

Berdasarkan pendapat di atas maka penggunaan dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperoleh dan mengumpulkan data sebagai tambahan yang bersifat melengkapi data atau informasi yang terkumpul sebelumnya. Data

yang dimaksud pada penelitian ini adalah data atau informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan dan bumdes bagaimana kondisi social ekonomi masyarakat nelayan di Desa Sangiang yang termasuk dalam data dokumentasi disini adalah literatur-literatur tentang BUMDes, pengambilan foto-foto kegiatan, hasil wawancara, bahkan penelitian terdahulu yang relevan.

## H. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2016: 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, penjabaran dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis data yang dipakai peneliti adalah analisis data berlangsung atau mengalir (*flow model analysis*). Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan pada teknik analisis data tersebut yaitu:

### 1. Tahap Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan. Objek yang akan direduksi dalam hal ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait hal tentang rekonstruksi sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

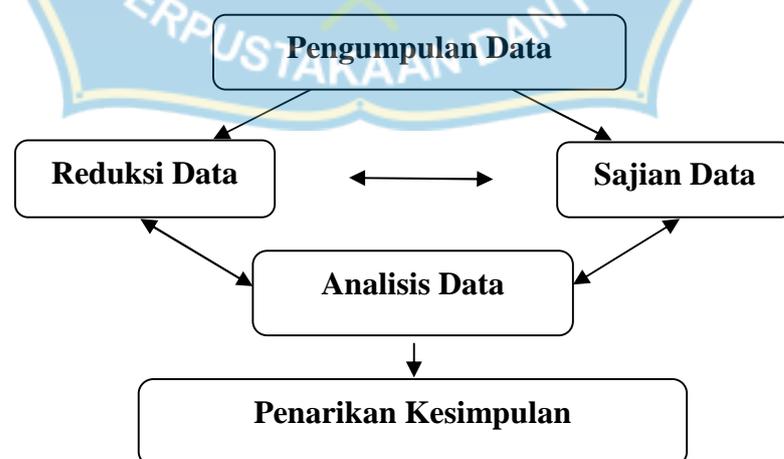
## 2. Tahap Penyajian Data

Tahap kedua dari prosedur analisis data adalah penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi yang menyatakan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan bahkan sampai pada pengambilan tindakan. Data yang disajikan pada tahapan ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi hal tentang rekonstruksi social ekonomi dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

## 3. Menarik Kesimpulan

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dilakukan setelah dilakukannya reduksi data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan adalah membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dan telah dilakukan reduksi serta penyajian dari data hasil penelitian tentang hal tentang bagaimana rekonstruksi social ekonomi dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Berdasarkan uraian di atas maka langkah analisis data ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Skema Model Analisi Interaktif (Isma Sirajuddin, 2017)

Gambar 3: Skema Analisis Data

## I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. data dan verifikasi/menarik kesimpulan. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2009: 267). Validitas penting untuk dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan pada saat penelitian dilakukan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada empat cara yang dilakukan peneliti dalam validitas ini, yaitu.

1. Triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif (Sutopo, 1996: 71). Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Beberapa cara pandang tersebut akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena muncul dan lebih bisa diterima kebenarannya. Menurut Patton, ada empat macam teknik triangulasi, yaitu;

- a) Triangulasi data, teknik ini juga disebut sebagai triangulasi sumber. Caranya adalah peneliti mengumpulkan data dimana wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari berbagai sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu bisa lebih teruji jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain.

b) Triangulasi peneliti, yang dimaksud dengan triangulasi peneliti adalah hasil penelitian baik data atau kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti. Dari berbagai pandangan dan tafsiran beberapa peneliti terhadap semua informasi yang berhasil digali dan dikumpulkan diharapkan bisa terjadi pertemuan pendapat yang pada akhirnya bisa lebih memantapkan hasil penelitian.

c) Triangulasi metode, jenis ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Misalnya peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam dan hasilnya diuji dengan pengumpulan data sejenis dengan teknik observasi terhadap tempat atau peristiwanya, dan juga bisa mengkaji rekaman atau beragam catatan yang berkaitan dengan peristiwa yang diteliti.

d) Triangulasi teori, triangulasi ini digunakan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Misalnya satu peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat tidak hanya dikaji misalnya dari teori sosial saja, tetapi juga digunakan pandangan dari teori budaya, politik atau ekonomi (Sutopo, 1996: 70).

2. Memperpanjang waktu penelitian, bermaksud untuk menggali informasi ataupun data-data yang masih dirasa kurang lengkap dengan persoalan

atau isu-isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal itu secara rinci.

3. Diskusi dengan expert (ahli), teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan ahli dalam bentuk konsultasi atau diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkap dan diketahui. Ahli dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing.
4. Diskusi dengan teman. Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan dalam bentuk diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkap dan diketahui agar penelitian mendalam dapat segera ditelaah.



## BAB IV

### DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

#### A. Deskripsi Umum Kabupaten Bima

##### 1. Geografis

Kabupaten Bima, yang merupakan bagian dari propinsi NTB, yang berada di ujung timur propinsi NTB. Luas wilayah Kabupaten Bima mencapai 4.374,65 km<sup>2</sup>, terdiri atas 315,96 Km<sup>2</sup> atau 7,22% lahan sawah dan 4.058,69 Km<sup>2</sup> atau 92,78% lahan bukan sawah. Luas lahan sawah ini meningkat sebanyak 8,53 km<sup>2</sup> jika dibandingkan tahun 2008 yang luasnya 307,43 Km<sup>2</sup>. Peningkatan luas areal sawah ini didorong oleh semakin berkurangnya luas hutan, baik itu hutan Negara maupun luas hutan rakyat. Luas wilayah daratan Kabupaten Bima lebih kurang 438.940 ha atau 22% dari luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten bima terbagi atas 18 kecamatan yang terdiri dari 198 desa dan 419 dusun 25 Batas wilayah kabupaten bima dibagi menjadi beberapa bagian yang terletak berbatasan langsung dengan daerah lain, yaitu sebagai berikut, sebelah utara perbatasan langsung dengan laut flores, sebelah selatan berbatasan langsung dengan laut samudra hindia, sebelah timur berbatasan dengan laut selat sape,sebelah barat barbatasan dengan laut kabupaten dompu. Berdasarkan potensi wilayah kabupaten bima dalam angka 2011-2013 luas wilayah kabupaten bima dirinci menjadi dua lahan yaitu lahan sawah atau kebun dan lahan bukansawah.lahan sawah dibagi menjadi

lahan sawah imigrasi dengan luas 23, 626 Ha, sawah tadah hujan dengan luas 10,819 Ha, sawah rawa pasang surut dengan luas --Ha, sawah rawa lebak dengan luas --- Ha, maka jumlah lahan sawah 34,445 Ha. Sedangkan lahan bukan sawah di bagi menjadi kebun dengan luas 73,070 Ha, lading dengan luas 13,333 Ha, perkebunan dengan luas 9,592 Ha, hutan rakyat dengan luas 37,043 Ha, padang rumput 8,772 Ha, dengan lahan yang tidak digunakan seluas 17,202 Ha, lahan lain-lain dengan luas 229,324 Ha, maka jumlah lahan yang bukan sawah adalah 338,336 Ha. peningkatan luas area persawahan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 didorong oleh semakin berkurangnya luas hutan, baik itu hutan Negara maupun hutan rakyat yang garap oleh rakyat untuk dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam guna dapat menutupi hidupnya. Rata-rata curah hujan selama tahun 2014 mencapai 63,87 mm perbulan dengan hari hujan rata-rata 5,81 hari perbulan, lebih rendah dibandingkan pada tahun 2013 yang mencapai 84,36 mm perbulan dengan banyak hari hujan rata-rata 6,9 hari perbulan. Curah hujan tertinggi antara bulan januari sampai dengan pertengahan Februari dan Desember yaitu 188,8 mm, 188,4 dan 335,6 mm. mengingat keberadaan curah hujan di kabupaten bima tersebut, serta bawang merah tidak mampu bertahan terlalu lama dan cenderung akan mengalami kebusukan. Maka pola penanaman bibit bawang merah biasanya di musim kemarau, sehingga proses pertumbuhan bawang merah akan mengalami peningkatan yang drastic. Pada tahun 2015, curah hujan di kabupaten bima tidak terlalu tinggi dan dapat melakukan aktivitas

seperti biasanya, dimana petani melakukan penggarapan lahan untuk di jadikan sebagai

Berdasarkan Sumber data Badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Bima,2014 menggambarkan tentang luas kabupaten bima yang berdasarkan kecamatan adalah 438.940 Ha.di kabupaten bima terdapat 18 kecamatan, dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Dari 18 kecamatan , terdapat satu kecamatan yang yang memiliki daratan yang paling sempit yaitu kecamatan palibelo dengan luas sekitar 5.803 Ha. dari wilayah kabupaten bima dan ada dua kecamatan yang memiliki daratan yang paling luas yaitu kecamatan sanggar dan kecamatan tambora. Kecamatan tambora memiliki wilayah yang paling luas di bandingkan dengan kecamatan lain yang ada di kabupaten bima, dengan luas 62.782 Ha atau sekitar 14,30 % dari keseluruhan wilayah yang terdapat di kabupaten bima. sedangkan kecamatan sanggar dengan luas 47.789 Ha atau sekitar 10, 89 % dari luas wilayah kabupaten bima dari sisi jarak kepusat pemerintahan kabupaten, kecamatan sanggar dan tambora merupakan kecamatan yang berlokasi terjauh dari pusat pemerintahan kabupaten, dimana jarak masing-masing tersebut sekitar 130 km dan 250 km. Adapun satu kecamatan yang berada di daratan yang paling tinggi yaitu kecamatan donggo yang mempunyai ketinggian sekitar 500 m diatas permukaan laut sehingga menjadikan kecamatan ini sebagai kecamatan dengan lokasi ketinggian tertinggi diatas permukaan laut. Rata-rata curah hujan selama tahun 2009 mencapai 63,87 mm per bulan dengan hari hujan rata-rata 5,81

hari perbulan, lebih rendah dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 84,36 mm per bulan dengan banyak hari hujan rata-rata 6,9 hari per bulan. Curah hujan tertinggi terjadi antara bulan Januari, Februari dan Desember yaitu 188,8 mm, 181,4 mm dan 335,6mm.



*Sumber Data : RTRW Kabupaten Bima, 2011-2031*

Gambar 4. Lokasi Kabupaten Bima dalam Peta Provinsi NTB

## 2. Topografi

Secara topografis wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%) adalah dataran. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan pertumbuhan penduduk kedepan, akan menyebabkan daya dukung lahan semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi

basis ekonomi dari pertanian tradisional ke pertanian wirausaha dan sektor industri kecil dan perdagangan. Sebagian wilayah mempunyai topografi yang bervariasi, dari datar hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-477,50 m di atas permukaan laut. Berdasarkan kelompok kemiringan lahan, wilayah dapat dikelompokkan atas kelompok lereng 0-2%, 3-5%, 16-40%, dan >40%.

Berdasarkan data RPJMD kabupaten bima tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa, kemiringan lahan setiap kecamatan yang ada di kabupaten bima cukup bervariasi, karena terdapat lahan datar seluas 0-2% yang terdapat di kecamatan woha dengan luas 4.593 Ha dari total luas kemiringan lahan. Lahan yang bergelombang 2-15% terletak di kecamatan sanggar/tambora sebesar 47.548 Ha. keadaan lahan curam 15-40% yang terletak di kecamatan belo >40 terbesar yang terletak di kecamatan bolo/mada panga, sape/lambu, dan wawo/langgudu berdasarkan luas wilayah masing-masing kecamatan. Adapun Struktur geologi di wilayah kabupaten bima terbagi menjadi beberapa jenis batuan:

- 1) Batuan endapan terdiri dari kerikil, pasir, lempung utama bersusun endisit.
- 2) Batuan endapan hasil gunung api terdiri dari hasil gunung api tua.
- 3) Batuan endapan yaitu terumbu koral terangkat yang terdapat di daerah pantai.

4) Batuan terobosan merupakan batuan yang mempunyai susunan batuan yang tak dapat dibedakan dan menerobos hasil batuan hasil gunung api, di kabupaten bima adalah endapan alluvial coklat, litosol, regosol, dan mediteran coklat.

Daerah kabupaten bima Sumber data: BPS kabupaten bima, dikutip dari RPJMD tahun 2010-2015 sangat dipengaruhi oleh tipe iklim D, E dan F, menurut schmidth dan ferguson, 1951, musim hujan relative pendek, curah hujan rata-rata tahunan 28-32 C. terjadi perbedaan suhu udara yang sangat besar antara siang dan malam. selain curah hujan tahunan yang relatif kecil, penyebarannyapun tidak, dimana bulan mei-oktober merupakan bulan yang jarang hujan. Bulan tersebut dapat di gunakan untuk bercocok tanam pertanian. Dengan hujan yang relative rendah, maka dapat di jadikan waktu untuk melakukan aktivitas pertanian bawang merah, sehingga dapat mendorong peningkatan nilai produksinya.

### **3. Hidrologi**

Kondisi hidrologi wilayah yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan Wilayah Kabupaten Bima adalah kondisi genangan, sungai dan mata air. Sebagian kecil areal dari wilayah Kabupaten Bima dipengaruhi oleh pasang surut air laut seluas 7 Ha (0,002 %) dan rawa yang tergenang terus-menerus seluas 287 Ha (0.066 %)". Daerah wilayah Kabupaten Bima banyak mengalir sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil dengan panjang aliran antara 5 sampai 38 km.

Dari sungai-sungai yang berjumlah 34 sungai sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk irigasi.

#### **4. Klimatologi**

Kabupaten Bima dipengaruhi tipe iklim D, E dan F (menurut Schmidh dan Ferguson, 1951). Keadaan curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Bima relatif pendek, penyebarannyapun tidak merata, dimana pada bulan Mei-Oktober curah hujan relatif kecil dan jarang terjadi. Keadaan dan distribusi curah hujan serta suhu udara setiap wilayah kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Bima bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

#### **5. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di Kabupaten Bima sebagian besar adalah kawasan hutan seluas 287.461,02 Ha (65,49%) dan persawahan seluas 27.337,80 Ha (6,23%). Sedangkan penggunaan lahan yang terkecil adalah kebun seluas 420,7 Ha (0,10%). rincian penggunaan lahan di daerah Kabupaten Bima dapat dilihat dibawah ini :

#### **6. Demografi**

##### **a. Jumlah Penduduk**

Masalah Kependudukan Bukanlah Masalah banyak atau tidaknya jumlah orang yang menempati suatu wilayah, akan tetapi masalah kependudukan merupakan masalah kepentingan pembangunan yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang menempati

suatu wilayah, maka akan semakin sempit ruang untuk mencari nafkah, sehingga dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan kemiskinan yang ada di suatu daerah, karena tidak mampu membendunginya adanya pengangguran. Di daerah kabupaten bima, masalah kependudukan menjadi masalah tersendiri. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, menimbulkan masalah yang sangat serius bagi kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya angka kelahiran bayi di kabupaten bima sangat dominan dibandingkan dengan berkurangnya angka kematian, hal ini akan berdampak pada ketersediaan bahan pangan sebagai bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Sumber data: dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bima 2013 menunjukkan bahwa, jumlah penduduk tiap-tiap kecamatan di kabupaten bima sebanyak 568.153 jiwa. Jumlah ini yang terdiri dari laki-laki sebanyak 287.257 dan perempuan sebanyak 280.895 dengan kata lain *sex ratio* kurang lebih sebanyak 97%. Di kabupaten bima ada beberapa kecamatan yang memiliki wilayah yang sanagat luas, dengan penduduk yang sangat sedikit seperti kecamatan tambora dan kecamatan soromandi. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki wilayah yang sempit tapi memiliki jumlah penduduk yang banyak, antara lain yaitu: kecamatan bolo, pali belo dan belo, yang merupakan daerah dengan wilayah paling sempit.

### **b. Kepadatan Penduduk**

Berdasarkan Sumber data: Diolah dari bima dalam angka 2013 menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada luas wilayah kabupaten bima adalah sebanyak 568.153 jiwa berdasarkan persebaran penduduk perkecamatan bahwa kecamatan bolo merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat dengan jumlah 789,88 jiwa/km

### **c. Komposisi Penduduk Kabupaten Bima Berdasarkan Kelompok Umur**

Berdasarkan Sumber data: dinas kependudukan dan catatan sipil kab. Bima menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten bima berdasarkan kelompok umur, menggambarkan bahwa kelompok umur 75 tahun sekitar 7.850 jiwa dari jumlah total penduduk yang ada. Sedangkan yang paling banyak jumlahnya adalah kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah 66.203 jiwa dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten bima

### **d. Jumlah Pencari Kerja Dikabupaten Bima**

Angkatan kerja di kabupaten bima yang berstatus bekerja atau sementara tidak bekerja, sedangkan pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Angkatan kerja dikabupaten bima tidak sebanding lurus dengan jumlah pencari kerja dan sedang bekerja. Hal ini diakibatkan oleh lapangan pekerjaan di kabupaten bima sangat terbatas untuk menampung pencari kerja, sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan berakibat pada meningkatnya kemiskinan. Terbatasnya lapangan pekerjaan di

kabupaten bima merupakan ketidak mampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan mengalami peningkatan yang drastic. Padahal daerah kabupaten bima merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah guna dikelola dan dimanfaatkan dengan baik guna dapat menghindari adanya pengangguran yang semakin hari semakin meningkat. Salah satu contoh di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, jika dikelola dan dikembangkan bidang pertanian tersebut, dimungkinkan akan dapat menyerap serta mengurangi pengangguran dan dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah kabupaten Bima tersebut.

Berdasarkan data bahwa jumlah angkatan kerja yang terdaftar dikabupaten bima pada tahun 2013 sebanyak 202.184 orang. Pekerja sebanyak 199.421 orang dan pencari pekerjaan sebanyak 2.763 orang. Pencari pekerjaan sebanyak tingkat pendidikan SMA sebanyak 793 orang dari jumlah pencari kerja. Sedangkan sedangkan yang paling sedikit dari tingkat pendidikan SPG/SGO/SGA dengan jumlah dua orang dari total pencari pekerjaan yang tersebar di kabupaten bima.

#### **e. Jumlah Kepala Keluarga Perkecamatan Di Kabupaten Bima**

Berdasarkan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bima menunjukkan bahwa perbandingan jumlah penduduk perkk kabupaten bima, rata-rata jumlah per KK adalah 3,64 jiwa. Kecamatan

dengan jumlah jiwa perKK, tertinggi adalah kecamatan madapangga adalah sebesar 3,98 jiwa per KK, dengan diikuti kecamatan lambitu sebesar 3,97 perKK, sementara kecamatan dengan jumlah jiwa per KK terkecil adalah kecamatan pali belo sekitar 3,15 jiwa perKK. Ditiap-tiap kecamatan tersebut, memiliki luas wilayah yang berbeda, sehingga area masing-masing wilayah tersebut bisa saja berubah berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.

### **B. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bima telah didesain melalui pengembangan kawasan strategis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, kawasan strategis dengan sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. Kawasan Strategis Propinsi di wilayah Kabupaten Bima :
  - a. Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan (tambak), pariwisata dan fungsi transportasi
  - b. Kawasan Waworada-Sape dan sekitarnya (Kecamatan Sape,wera, Lambu, Wawo, dan Langgudu) dengan sektor unggulan perikanan, industri, dan pertanian
  - c. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora
  - d. Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang;
2. Kawasan Strategis Kabupaten Bima dengan sudut kepentingan ekonomi

- a. Kawasan Lewamori, meliputi Kecamatan Woha sebagai ibukota Kabupaten Bima dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa, Kawasan Minapolitan, yang berpusat di Desa Penapali Kecamatan Woha dan Kawasan Pariwisata di Pantai Kalaki
  - b. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan
  - c. Kawasan Strategis Wera yang meliputi Pai dan Oi Tui dengan sektor unggulan peternakan (sapi), perikanan (rumput laut), dan Pariwisata.
  - d. Kawasan Strategis Monta yang meliputi Wilamaci, Laju, Doro O'o, Waworada, Tolo Uwi, dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan (rumput laut), perikanan tangkap, dan pariwisata (pantai wane dan pantai rontu).
  - e. Kawasan Strategis Lambu yang meliputi Sumi dan Nggelu dengan sektor unggulan peternakan (sapi), pertanian (jagung), dan perikanan tangkap.
3. Kawasan strategis dengan sudut Kepentingan Lingkungan Hidup adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Banta
4. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Strategis Cagar Budaya yang meliputi :
- a. Kompleks rumah adat-Wawo
  - b. Perkampungan tradisional Sambori
  - c. Perkampungan tradisional Mbawa-Donggo
  - d. Kompleks Dana Mbojo-Donggo dan

e. Situs Wadu Pa'a-Soromandi

5. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang meliputi :

- a. Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
- b. Kawasan peruntukan basis militer, daerah ujicoba sistem persenjataan dan /atau kawasan industri sistem persenjataan
- c. Pembatasan dan penataan antara lahan terbangun disekitar pertahanan dan keamanan
- d. Penetapan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan.

Adapun rencana Pembagian Zona Wilayah Pesisir dan Laut, sesuai kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima 2011-2031, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bima dikelompokan ke dalam 5 (lima) kawasan pengembangan, yang terdiri dari :

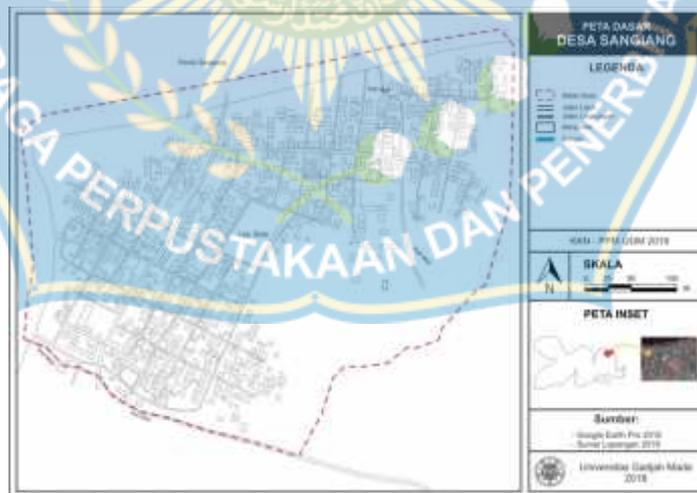
- a. Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya
- b. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya
- c. Kawasan Sape dan sekitarnya
- d. Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya.

## C. Deskripsi Khusus Desa Sangiang sebagai Latar Penelitian

### 1. Sejarah Desa Sangiang

Desa sangiang merupakan salah satu dari empat belas(14) Desa yang berada dibagian timur ibu Kota Kecamatan Wera Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 16.424 Ha dengan jumlah penduduk 4.430 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.206 orang, perempuan sebanyak 2.224 orang dan memiliki kepala keluarga sebanyak 1.051 KK dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Desa Ranga Solo Kecamatan Wera
- Sebekah Barat : Desa Tadewa Kecamatan Wera
- Sebelah Timur : Desa Tawali Kecamatan Wera



Sumber : Pemdes Sangiang

Gambar 5. Peta Desa Sangiang

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Masyarakat Desa Sangiang pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani yang lebih terarah pada bidang peratanian, nelayan, perkebunan, dan peternakan.

Desa Sangiang pada awalnya mempunyai sejarah dengan desa lain sehingga terbentuknya suatu desa tentu mempunyai latar belakang. Pada masa pemerintahan Kesultanan Bima, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin langkah-langkah yang dilakukan ialah pendidikan dikalangan generasi muda baik pendidikan agama maupun pendidikan pada umumnya.

Dalam mewujudkan kebijakan itu Sultan Muhammad Salahuddin bersama Ruma Bicara Abdul Hamid mendirikan Madrasah yang dipimpin oleh seorang ulama yang berjiwa nasionalis. Untuk memajukan pendidikan Sultan melakukan pengelolaan secara baik dan terarah dengan serta adil sehingga mengherankan apabila tokoh pendidikan dan politik di Bima pada umumnya berasal dari Desa. Madrasah ini didirikan di seluruh Kesultanan Bima tidak terkecuali di Wera dengan berdirinya sekolah Rakyat di desa Sangiang. Dengan demikian Kesultanan Bima makin dikenal oleh Bangsa-Bangsa asing seperti Cina, Arab, dan Jepang.

Sekitar tahun 1956 ada seorang pengembara dan pedagang yang berasal dari tanjung malaka yang bernama Tengku Awi (Raden Alwi) orang ini disamping ahli dagang dan juga ahli dalam ramuan obat-obatan tradisional beliau mencari bahan obat-obatan yang dikala itu terbanyak ada di Sangiang. Tengku Alwi berdomisili selama 13 tahun dan beliau inilah yang pertama kali memberikan Nama kampung ini dengan Sangiang. Pada

masa pemerintahan Jeneli Mpore, Desa Sangiang dibentuk atas petunjuk Jeneli Mpore kepada tokoh-tokoh Agama dan Adat seperti : H. Arrahman Abu Tua Hawa, Ibrahim Ompu Kaka, H. Yasin Bahasa, H. Sanusin Abu Mbolo, Kasrin Ompu Lebe, H. Barahima M. Saleh.

Saat ini Sangiang terdiri dari delapan dusun antara lain :

1. Dusun Doroma
2. Dusun Karombo
3. Dusun Sangiang
4. Dusun Bronjong
5. Dusun La Sinta
6. Dusun Sarae
7. Dusun Tewo
8. Dusun La Joro

## **2. Sejarah Pemerintahan Desa Sangiang**

Desa Sangaing terletak di pinggir Kota Kecamatan Wera yang mana jarak antar Desa Sangiang dengan pusat Kota Kecamatan Wera adalah 7 KM. Demikian sejarah singkat Desa Sangiang semoga bermanfaat bagi kita semua.

Dalam musyawarah antara Jeneli Mpore dengan tokoh-tokoh ini diambil suatu keputusan atau mufakat untuk mengangkat Dalu Dona sebagai Dalu yang disebut saat ini Kepala Desa, lama jabatan Dalu Dona ini selama

9 tahun. Setelah itu Dalu Dona tidak lagi menjadi Dalu maka pemerintahan dilanjutkan oleh :

1. Dalu Ali selama 8 tahun menjabat.
2. Dalu Bahasa atau di sebut Ompu Wa'u selama 16 tahun beliau meninggal saat menjabat.
3. Dalu H. Jamaluddin selama 20 tahun beliau meninggal saat menjabat

Semua Dalu Kepala di atas bukan merupakan hasil pemilihan, namun atas usulan dan saran dari tokoh Agama / Adat yang mana Jeneli Mpire hanya mensyahkan saja. Pada masa pemerintahan Dalu H. Jamaluddin (sekitar tahun 1950) berakhirlah kepemimpinan “Bora Hadat” yang bersama dengan berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan yang juga diganti dengan Pemerintahan Swapraja.

Dengan lama pemerintahan berlangsung 8 tahun, yaitu tahun 1950 s/d 1958. Seiring dengan kemajuan jaman dan perubahan tata pemerintahan, maka kepala desa selanjutnya dipilih langsung oleh masyarakat. Sehingga berturut-turut yang memimpin Desa Sangiang adalah :

1. H. Imran selama 32 tahun sebagai Kepala Desa
2. Drs. Saidin Murtada selama 13 tahun sebagai Kepala Desa
3. A. Rasyid H. Imran., SE selama 6 tahun sebagai Kepala Desa
4. Muhammad Saleh H. Mustaram selama 5 tahun sebagai Kepala Desa
5. A. Rasyid H. Imran., SE sebagai Kepala Desa sampai sekarang

Demikian sekilah sejarah latar belakang terbentuknya Masyarakat dan Pemerintahan Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

### **3. Topografi Desa Sangiang**

Desa sangiang merupakan salah satu dari empat belas (14) Desa yang berada di bagian utara pusat Kota Kecamatan Wera Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas 16.424 Ha. Kondisi iklim di Desa Sangiang tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim pada desa lainnya di Wilayah Kecamatan Wera, secara umum dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau berlangsung antara bulan juli hingga oktober dan musim hujan berlangsung antara bulan November sampai dengan bulan februari dengan suhu rata-rata berkisar 35 derajat celcius, kelembaban udara berkisar antara 30-33%, sedangkan curah hujan sebesar 35-36 mm dengan curah hujan terendah bulan april dan curah hujan tertinggi pada bulan januari.

### **4. Gambaran Umum Demografis**

Jumlah penduduk Desa Sangiang dari Tahun ke Tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 penduduk Desa Sangiang berjumlah 4208 jiwa, pada tahun 2014 meningkat menjadi 4315 jiwa dan pada tahun 2015 jumlah penduduk menjadi 4430 jiwa.

Tabel 1. Luas Dusun, RW, RT, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk.

No	Nama	Luas (KM)	Jumlah penduduk laki-laki (jiwa)	Jumlah penduduk perempuan (Jiwa)	Kepadatan (jiwa)
1	Dusun Doroma	8,45 Ha	326	335	661 (4 jiwa / km)
2	Dusun Karombo	4,31 Ha	239	211	450 (4 jiwa / km)
3	Dusun Sangiang	4,39 Ha	224	235	459 (4 jiwa / km)
4	Dusun Bronjong	4,34 Ha	181	198	379 (4 jiwa / km)
5	Dusun La Sinta	6,35 Ha	292	310	602 (4 jiwa / km)
6	Dusun Sarae	5,36 Ha	340	339	679 (4 jiwa / km)
7	Dusun Tewo	5,36 Ha	365	368	723 (4 jiwa / km)
8	Dusun La Joro	8,55 Ha	239	238	477 (4 jiwa / km)

Kepada tertinggi penduduk tertinggi Desa Sangiang berada pada dusun Tewo sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat pada dusun Bronjong.

Tabel 2. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Desa Sangiang

No	Nama	Jumlah Penduduk Laki-Laki (Jiwa)	Jumlah Penduduk Perempuan (jiwa)	Jumlah
1	Dusun Doroma	326	335	661
2	Dusun Karombo	239	211	450
3	Dusun Sangiang	224	235	259
4	Dusun Bronjong	181	198	379
5	Dusun La Sinta	292	310	602
6	Dusun Sarae	340	339	679
7	Dusun Tewo	365	368	723
8	Dusun La Joro	239	238	477
<b>JUMLAH</b>		<b>2206</b>	<b>2224</b>	<b>4430</b>

a. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk Desa sangiang pada tahun 2015 adalah 4.427 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.150 jiwa dan perempuan 2.277 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan

b. Agama dan Budaya

Penduduk yang tinggal di desa sangiang yaiu seluruhnya adalah suku asli Bima dan seluruhnya adalah beraga islam.

Hidup dalam suasana tolong menolong dan gotong royong sudah menjadi ritme kehidupan sehari-hari di desa sangiang. Kebiasaan social itu sering disebut *mboloweki*, yaitu tradisi kumpul bermusyawarah bersama pada saat pra acara sampa pada akhir hajatan. Nilai-nilai solidaritas social dan kebersamaan masyarakat seperti slaing membantu, gotong – royong untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan suatu imbalan jasa.

Table 3. jumlah penduduk menurut Agama

Agama	Jumlah	Presentase
Islam	4,430	100%
Kristen	0	0%
Katolik	0	0%
Hindu	0	0%
Budha	0	0%
Konghucu	0	0%

## 5. Rancangan Kerangka Ekonomi Masyarakat Desa

- a. Pendapatan / penghasilan masyarakat desa sangiang dari berbagai sector usaha

Table 4. Struktur Perekonomian Desa Tahun 2013-2015

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015
1	Perdagangan	124 orang	132 orang	157 orang
2	Jasa angkutan	- orang	- orang	- orang
3	Pertanian	419 orang	512 orang	594 orang
4	Perikanan / Nelayan	182 orang	213 orang	291 orang
5	Buruh	103 orang	205 orang	243 orang
6	Peternakan	145 orang	171 orang	242 orang
7	Kuli bangunan	11 orang	20 orang	29 orang
8	Montir / otomotif	03 orang	05 orang	09 orang
9	Usaha meubel	06 orang	10 orang	13 orang
10	Pegawai Swasta	87 orang	104 orang	136 orang
11	Pegawai Negeri/ TNI/Polri	13 orang	22 orang	42 orang
12	Wiraswasta lainnya	03 orang	10 orang	26 orang
<b>Jumlah</b>		<b>1096 orang</b>	<b>1404</b>	<b>1782</b>

b. Ketenagaankerjaan

Penduduk usia kerja diatas 15 tahun sebanyak 3607 jiwa, yang sedang bekerja tercatat sebanyak 1407 jiwa, laki-laki tercatat 679 jiwa, sedangkan yang perempuan tercatat sebanyak 778 jiwa. Dimana yang sedang bekerja tersebut seluruhnya bekerja di desa, sedangkan 152 jiwa secara keseluruhannya menjadi pengangguran di desa. Penganggur laki-laki tercatat sebanyak 80 orang ,

penganggur perempuan tercatat 72 jiwa, yang sekolah 995 jiwa. Laki laki 527 jiwa, yang perempuan sebanyak 469 jiwa, yang mengurus rumah tangga sebesar 1012 jiwa. Sementara perempuan yang bekerja tercatat sebanyak 778 jiwa.

## 6. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

★ Anggaran pendapatan dan belanja desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun, dimana dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan .

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa dimana pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (25%), jumlah penduduk miskin (35%), luas wilayah (10%) dan tingkat kesulitan geografis (30%) yang ditransfer ke APB desa.

Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah sedangkan pengelolaan dana desa dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBD Desa) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa dalam APBD Desa kabupaten/kota maupun APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah/desa dengan dasar hukum PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan rakyat setempat. Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati kabupaten bima no 8 tahun 2015.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Tujuan pendirian BUMDES antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat

menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

➤ Prinsip Teknis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- Pengelolaan bumdes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member base dan self help yang dijalankan secara professional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-local-an, termasuk ciri-sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk( barang dan jasa) yang dihasilkan.

- BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak lain, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman ke pihak ke tiga, sesuai aturan perundang-undangan . pengaturan lebih lanjut BUMDes tentunya akan diatur melalui peraturan daerah(Perda).

- Bumdes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan. Mengurangi praktek ijon (rentenir) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal yang penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
- Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian bumdes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, membayar pajak di desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.
- Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapatkan pelayanan utama BUMDes adalah:(a)masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sector pertanian dan mealukan usaha ekomoi yang bersifat informal.(b) masyarakat desa yang berpenghasilan tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal

pengembangan usaha selanjutnya.(c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, sehingga banyak jatuh ke pengusaha yang memiliki modal lebih kuat dan yang terpenting adalah.(d) masyarakat desa yang dalam usahanya cenderung diperburuk oleh system pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa, atas dasar prediksi tersebut maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan system pengelolaannya.

- Secara umum tujuan pendirian BUMDes di maksudkan untuk :
  - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan maksimal), agar berikutnya berkembang usaha masyarakat Desa .
  - b. Memberdayakan masyarakat desa sebagai wilayah otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
  - c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa, serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya, hal ini di sebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa

yang semakin besar . Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian dan pengelolaan BUMDes. Jika ini berlaku sejalan , maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan dan usaha pembangunan Desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan di semua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka lapangan pekerjaan serta akses pasar terbuka.

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan data-data hasil penelitian data hasil observasi di desa Sangiang, data wawancara dengan beberapa informan dan data hasil telaah dokumen yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan usaha bumdes, dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang melalui BUMDes.

### **1. Pemanfaatan Usaha Bumdes Dikalangan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang**

BUMDES Desa Sangiang baru resmi dibentuk pada tahun 2017 lalu, tepatnya dua tahun setelah dana akses modal untuk BUMDES pertama kali dianggarkan, yaitu pada tahun 2015. Melalui Anggaran Dana Desa, Pemerintah desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima telah memberikan akses

modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar 40 juta rupiah. Bahkan penganggaran tersebut dilakukan sebelum BUMDES Sangiang dibentuk. Akses modal tersebut dianggarkan secara bertahap, yaitu pada tahun 2015 sebesar 20 juta rupiah dan anggaran pada tahun 2016 sebesar 20 juta rupiah.

Anggaran itu diharapkan mampu dijadikan sebagai modal awal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Namun, hingga tahun 2019 ini, BUMDesSangiang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sangiang sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui melalui beberapa data observasi peneliti di Desa Sangiang yang berkaitan tentang pemanfaatan BUMDes, yaitu sebagai berikut:

Hasil observasi yang dilakukan di Desa Sangiang menunjukkan bahwa:

“BUMDes belum mampu memberdayakan nelayan Desa Sangiang apalagi memberikan manfaatnya, hal ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian nelayan tidak mengalami kemajuan bahkan hasil tangkap hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ini nelayan berusaha melakukan terobosan guna meningkatkan pendapatan dengan mengandalkan tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapan atau istrinya yang menjual keliling kampung. Akan tetapi upaya tersebut justru menyebabkan nelayan terjebak pada ketergantungan dengan pihak lain sekaligus menempatkan diri pada posisi tawar yang lemah”.

Dari hasil observasi peneliti di Desa Sangiang menunjukkan bahwa BUMDES tidak memberikan manfaatnya kepada nelayan sehingga kondisi ekonomi bahkan pekerjaan nelayan tidak berkembang apalagi melahirkan

inovasi baru bumdes untuk pemberdayaan nelayan. Dengan demikian masyarakat nelayan desa Sangiang sangat berharap ditinjau kembali kebijakan sosial ekonominya kemudian hasil tangkapan yang dijual lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan, dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha. Hal ini membuat nelayan masih jadi nelayan tradisional BUMDES yang diharapkan sebagai pencetus inovasi baru bagi pemberdayaan mereka belum bias memberikan manfaatnya untuk nelayan.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi masyarakat, Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa menjadi salah satu instrumen penting dalam pembinaan dan pengembangan wilayah pesisir, tapi tampaknya belum mampu memberikan peran yang maksimal, karena prakteknya sekedar melestarikan gagasan semata.

Sebagaimana observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai pemanfaatan usaha BUMDes yang belum mampu memberikan perannya secara maksimal menunjukan bahwa:

“pemerintah Desa Sangiang telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang rencananya akan digunakan sebagai pelelangan dan penjualan ikan hasil tangkap nelayan desa sangiang namun sampai pada saat peneliti melakukan observasi TPI belum difungsikan sesuai fungsinya malah terbengkalai dan tak terurus”.

Pemerintah Desa Sangiang telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Desa Sangiang sehingga nelayan tidak perlu lagi susah mencari pembeli ikan dan desa mengalami keuntungan namun pada realitasnya tidak

sesuai dengan harapan pembangunannya sebagai tempat pelelangan dan penjualan ikan hasil tangkap nelayan kepada masyarakat sekitar dimana pemerintah desa atau pihak BUMDes yang kelola TPI sebagaimana mestinya agar perekonomian nelayan mengalami peningkatan lewat proses jual beli tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan atau biasa disingkat TPI.

Kemudian dari data observasi di atas, maka diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber berkaitan dengan pemanfaatan usaha BUMDes adalah sebagai berikut, yaitu:

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan ketua BUMDes desa Sangiang S (33 tahun)

“BUMDes Sangiang saat ini memiliki unit usaha simpan pinjam, unit jual beli beras. Unit usaha ini merupakan sebuah strategi untuk mendongkrak semangat masyarakat untuk lebih semangat membangun desa melalui BUMDes karena BUMDes juga merupakan hal baru yang masyarakat juga kurang begitu mengenal, jadi lewat unit usaha awal ini harapan pengurus BUMDes memancing unit usaha lainnya akan bermunculan dengan beriringnya waktu dalam memanfaatkan modal usaha..”. (Wawancara: 18 Agustus 2019)

Dari penjelasan informan S di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Sangiang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi melalui BUMDes Desa Sangiang dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh warga masyarakatnya. Kemudian pemerintah dan pengurus BUMDes sebagai fasilitator dan regulator dalam pengembangan ekonominya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena BUMDes merupakan wadah dari unit-unit usaha yang ada di desa. Saat ini BUMDes Sangiang memiliki 2 unit usaha dari unit usaha awal yang dirintis ini perangkat desa dan pengurus bumdes berharap menjadi pemicu

tumbuhnya unit-unit usaha baru yang akan membawa perkembangan ekonomi.

Kemudian diperjelas lagi oleh dengan LM (27 Tahun) ketua unit simpan pinjam bahwa :

“Melihat potensi sdm masyarakat desa yang banyak bekerja sebagai nelayan dan petani pengurus merintis usaha, maka BUMDes mendirikan unit usaha simpan pinjam. Inisiatif ini untuk membantu permodalan sebesar RP.17.000.000 masing-masing 1 juta rupiah perorang untuk mengembangkan pekerjaannya. BUMDes memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah sehingga tidak memberatkan masyarakat”. (wawancara 19 Agustus 2019)

Unit usaha simpan pinjam yang didirikan BUMDes Sangiang merupakan hasil dari penggalian potensi mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan usahanya. BUMDes memberikan pinjaman modal dengan nilai bunga yang rendah. Jumlah modal yang dipinjamkan masing-masing 1 juta rupiah perorang untuk membantu perekonomian warga yang membutuhka sehingga jika ada masyarakat yang butuh modal usaha biar pinjam di BUMDes.

Nyatanya unit usaha dan program dari BUMDes belum di rasakan oleh nelayan desa sangiang unit usaha seperti simpan pinjam modalpun nelayan di desa sangiang belum mendapatkan bantuan modal padahal jika pihak BUMDes memberikan modal kepada nelayan dengan syarat atau kontrak kerja bahwa nelayan yang meminjam modal kepada BUMDes agar menjual hasil tangkapan ikan kepada bumdes agar BUMDes bisa menjual atau mengolah ikan hasil tangkapan nelayan sehingga pihak BUMDes dan nelayan saling untung apalagi pihak pemerintah dea telah membangun TPI

(Tempat Pelelangan Ikan) di Desa Sangiang sehingga nelayan tidak perlu lagi susah mencari pembeli dan desa mengalami keuntungan, tapi hasil pengelolaan dan pengembangan dua unit usaha tidak berdampak positif terhadap PAD Sangiang.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan seorang nelayan A (50 tahun) mengenai bagaimana pemanfaatan BUMDes untuk masyarakat nelayan Desa Sangiang mengatakan bahwa :

"Setau saya BUMDes tidak ada bantuannya berupa senar,kail maupun modal untuk melaut kepada saya apalagi datang melihat melihat kondisi nelayan di dusun tewo, saya hanya mendengar Bumdes banyak uangnya tapi saya tidak pernah dapat sumbangan uang dari BUMDes bantuan perlengkapan, apalagi merasakan manfaatnya bagi nelayan sekitar sini " (wawancara 19 agustus 2019)

Dari penjelasan A (50 Tahun) di atas maka dapat diketahui tentang pemanfaatn bumdes pada masyarakat nelayan Desa Sangiang. Dengan demikian masyarakat nelayan Desa Sangiang sangat berharap ditinjau kembali kebijakan sosial ekonomi dan bantuan dari BUMDes dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan yang jauh dari sejahtera untuk nelayan Desa Sangiang, ini menandakan bahwa BUMDes belum bisa mengelola dan memberdayakan masyarakat nelayan Desa Sangiang lewat usaha usaha BUMDes antara lain peminjaman modal untuk membantu segala keperluan nelayan agar hasil tangkapan nelayan bisa bernilai lebih dan otomatis perekonomian masyarakat nelayan lebih baik dengan modal usaha yang seharusnya dimanfaatkan dan dirasakan oleh nelayan Desa Sangiang.

Selain dari kedua sumber data di atas, peneliti juga mendapatkan data dokumentasi dari hasil telaah literatur tentang pemanfaatan BUMDES untuk masyarakat nelayan yaitu sebagai berikut :

Dari hasil telaah literatur peneliti menemukan bahwa:

“Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir nelayan yang dilaksanakan memiliki kegiatan pokok berupa pemberian modal ekonomi kreatif kepada kelompok nelayan yang dibantu. Modal ekonomi produktif dimaksudkan untuk penguatan permodalan kelompok nelayan.(dokumentasi: Jurnal IPB pemberdayaan komunitas nelayan melalui program ekonomi masyarakat pesisir (studi kasus desa labuan kecamatan lage kabupaten poso provinsi Sulawesi tengah) penulis darma metusala 2005)”.

Dari data di atas maka dijelaskan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan antara lain kurangnya modal yang dimiliki para nelayan perlu diberikan modal lewat usaha simpan pinjam bumdes kepada nelayan sehingga masyarakat nelayan dapat diberdayakan akhirnya perekonomian masyarakat mengalami peningkatan pendapatan nelayan lewat modal ekonomi produktif.

Kemudian diperjelas dengan data telaah dokumen yang di dapat peneliti dimana menunjukkan bahwa:

“BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dibentuk sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.(dokumen jurnal oleh Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana: Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng 2018, Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018)”

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan

usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga dalam menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang, menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa.

Tentunya masyarakat desa Sangiang berharap BUMDes Sangiang memiliki kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan perekonomian desa. Namun, harapan itu pupus ditengah jalan, ketika BUMDes Sangiang memutuskan hanya membentuk dua unit usaha saja, yaitu unit usaha simpan pinjam dan jual beli beras.

## **2. Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima**

Rekonstruksi sosial ekonomi yang dimaksud dalam penelitian adalah menyusun kembali bumdes sebagai lembaga usaha milik desa sesuai dengan fungsinya dalam pemberdayaan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan desa sangiang lewat bumdes yang hadir dan dikelola oleh desa sebagai usaha bersama dengan masyarakat sehingga dalam menjalankam fungsi dan usaha-usahanya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat

nelayan di Desa Sangiang. Agar kemudian masyarakat nelayan Desa Sangiang bisa diberdaya tingkat ekonomi maupun sosialnya lewat bumdes sehingga perlu dikonstruksi (susun kembali). Dinamika kehidupan yang dialami oleh masyarakat nelayan khususnya di Desa Sangiang yang mempunyai polarisasi kehidupan yang selama ini terkesan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Dalam pengertiannya Pemberdayaan adalah proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002). Konsep pemberdayaan (masyarakat nelayan) dapat dipahami juga dimaknai dalam konteks menempatkan posisi masyarakat. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002).

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (*People Centered Development*). Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan kepadanya selalu merujuk pada upaya perbaikan, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya. Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat

(*Bottom Up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui melalui beberapa data observasi peneliti di desa sangiang yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sangiang yaitu :

Hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Sangiang menunjukkan bahwa:

“Sejak BUMDes Desa Sangiang resmi dibentuk pada tahun 2017 lalu hanya melahirkan 2 unit usaha yaitu simpan pinjam uang dan jual beli beras dan peneliti melihat unit usaha tersebut belum memberikan manfaat untuk pemberdayaan nelayan di desa sangiang”.

Dari hasil observasi diatas jelas menunjukkan bahwa selama kurun waktu sejak dibentuknya bumdes mulai 2017 pengurus bumdes hanya membentuk 2 unit usaha yang kemudian dari kedua unit usaha tersebut tidak memberikan hasil dan manfaat sama sekali terhadap para nelayan dalam melangsungkan pekerjaannya apalagi membantu memberdayakan mereka lewat usaha-usaha BUMDES di Desa Sangiang, dan kondisi perekonomian masyarakat nelayan di desa sangiang hanya cukup untuk modal beli perlengkapannya.

Seperti observasi yang peneliti lakukan selanjutnya berkaitan dengan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang menunjukkan bahwa:

“BUMDes belum mampu memberikan peran yang maksimal, karena Badan Usaha Milik Desa tidak mampu berkembang dengan baik seperti yang diharapkan bahkan beralih fungsi seperti BUMDES di desa sangiang”.

Dari hasil observasi peneliti Di Desa Sangiang menunjukkan bahwa bumdes belum optimal dalam melaksanakan fungsi dan tujuan pendiriannya yang dibangun dengan semangat gotong royong untuk usaha bersama pemerintah desa dengan masyarakatnya terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Sangiang belum merasakan manfaat dari unit usaha bahkan BUMDes sendiri mengalami peralihan fungsinya sehingga perlu untuk di fungsikan kembali sesuai dengan fungsinya demi diberdayakan nelayan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi sangatlah penting dilakukan oleh BUMDes Desa Sangiang untuk membantu mensejahterakan masyarakat nelayan Desa Sangiang dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Selanjutnya dari hasil observasi peneliti di desa sangiang menunjukkan bahwa:

“BUMDes Sangiang telah gagal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nelayan, petani, peternak dan pengrajin tenun kita tidak pernah diberdayakan untuk peningkatan ekonomi desa”.

Peluang yang dimiliki adalah kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan pendayagunaannya potensinya di atas membawa masyarakat nelayan tidak memperoleh pendapatan yang memadai, di sisi lain kebijakan sosial ekonomi tidak memberikan solusi nyata, yang akhirnya berdampak pada kemiskinan.

Kemudian dari data observasi di atas, maka diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang informan perangkat di Desa Sangiang N (40 Tahun), yaitu:

“pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dan perangkat Desa Sangiang awalnya menggali dan mengobservasi potensi desa.. Karena BUMDes ini dibentuk sebagai wadah dari unit-unit usaha yang ada di desa dan pemangku kebijakan. BUMDes Sangiang saat ini memiliki unit usaha simpan pinjam, unit jual beli beras bagi masyarakat Desa Sangiang yang membutuhkannya”. (wawancara : 19 agustus 2019

Dari pemaparan diatas yaitu pemerintah Desa Sangiang melakukan tahapan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi melalui BUMDes Sangiang dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh warga masyarakatnya. Kemudian pemerintah dan pengurus BUMDes sebagai fasilitator dan regulator dalam pengembangan ekonominya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena BUMDes merupakan wadah dari unit-unit usaha yang ada di desa. Saat ini BUMDes Sangiang memiliki 2 unit usaha. Dari unit usaha awal yang dirintis ini perangkat desa dan pengurus desa berharap menjadi pemicu tumbuhnya unit-unit usaha baru yang akan membawa perkembangan ekonomi.

Seorang pengurus BUMDes yang lain OM (29 tahun) juga menuturkan bahwa:

“BUMDes Sangiang dalam mengelola akses modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sangiang berhasil membentuk dua unit usaha sekaligus, Yaitu unit usaha Simpan Pinjam dengan bunga rendah dan

Bisnis jual beli beras. Kedua unit usaha tersebut dikelola dan di kembangkan selama hampir 2 tahun tahun berharap sebagai alternatif ekonomi baru”. (Wawancara 19 agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan OM diatas bahwa unit usaha simpan pinjam yang didirikan BUMDes Sangiang merupakan hasil dari penggalian potensi mengingat banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan dan peningkatan profesinya sehingga kemudian hasilnya perekonomian bagus untuk petani dan nelayan. BUMDes memberikan pinjaman modal dengan nilai bunga yang rendah untuk unit usaha simpan pinjam

Nyatanya unit usaha dan program dari BUMDes belum di rasakan oleh nelayan Desa Sangiang unit usaha seperti simpan pinjam nelayan di desa sangiang belum mendapatkan bantuan modal padahal jika pihak BUMDes memberikan modal kepada nelayan dengan syarat atau kontrak kerja bahwa nelayan yang meminjam modal kepada BUMDes agar menjual hasil tangkapan ikan kepada bumdes agar bumdes bisa menjual atau mengolah ikan hasil tangkapan nelayan sehingga pihak BUMDes dan nelayan saling untung.

Hasil wawancara pendapat kedua pengurus BUMDes di atas diperjelas dengan penjelasan dari seorang nelayan H (52 Tahun) tentang pemberdayaan BUMDes bagi masyarakat nelayan bahwa:

"Setau saya BUMDes tidak ada bantuannya berupa senar,kail maupun modal untuk melaut kepada saya apalagi datang melihat melihat kondisi nelayan di dusun tewo, saya hanya mendengar Bumdes banyak uangnya tapi saya tidak pernah dapat sumbangan

uang dari bumdes apalagi bantuan perlengkapan”. (wawancara 18 agustus 2019)

Dari hasil wawancara dengan nelayan H diatas menunjukkan bahwa selama ini unit usaha dari bumdes belum menyentuh nelayan di desa sangiang baik berupa peminjaman modal atau bisnis beras nelayan hanya mengetahui bahwa bumdes banyak uangnya tapi kalau untuk memberdayakan nelayan dengan modal tersebut belum pernah. Di satu sisi kurang sosialisasi bahkan edukasi dari pemerintah mengenai fungsi bumdes ini sehingga para nelayan dapat memanfaatkan unit usah yang ada missal pinjam modal untuk pengembangan hasil tangkapnya.

Seperti penjelasan dari seorang informan nelayan diatas diperkuat dengan hasil wawancara dengan nelayan w ( 40 tahun) tentang pemberdayaan nelatyan dengan bumdes bahwa :

“Untuk bantuan alat-alat untuk menunjang keperluan nelayan setau saya belum ada untuk warga sekitar sini tidak tau warga nelayan lainnya mungkin ada tapi selama ini dengar tidak ada bantuan dari BUMdes berupa uang, pukat, mesin sampan atau tali pancing dan seingat saya belum ada pengurus bumdes/pemerintah desa datang melihat nelayan apalagi memberikan bantuan”.( wawancara 19 jagustus 2019)

Masyarakat sangat berharap pemerintah desa Sangiang melalui BUMDes mampu mengelolah sumber daya-sumber daya tersebut, namun tidak pernah ada kata untuk itu, alias tidak ada program atau unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes untuk mengelolah sumber daya itu. Dan kemudian dari hasil wawancara dengan nelayan jelas menunjukkan bahwa bahwa masyarakat nelayan membutuhkan peranan bumdes dalam

meningkatkan taraf hidup dan memberikan bantuan segala perlengkapan nelayan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat nelayan sangiang.

Selain dari kedua sumber data di atas, peneliti juga mendapatkan data dokumentasi dari hasil telaah literatur tentang Pemberdayaan Masyarakat Nelayan yaitu sebagai berikut :

Dari hasil telaah literatur peneliti menemukan bahwa:

“Dalam konteks kontribusi badan usaha milik desa, seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa badan usaha milik desa ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah”. (jurnal : Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076. **KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)** Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo 2016)

Dari hasil telaah dokumen di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa seharusnya BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa ini akan berkaitan dengan apa yang akan diberikan oleh BUMDes untuk masyarakat desa. Hal ini dapat berupa pelayanan. Rendahnya produktivitas pelayanan desa utamanya di BUMDes selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumberdaya manusia di bidang manajemen dan lain lain. Sehingga dalam kontribusi ini desa juga harus memandang dari segi kerjasama dalam mengembangkannya demi meningkatkan pendapatan desa dan diberdayakannya masyarakat nelayan.

Selanjutnya, peneliti melakukan telaah dokumen yang menunjukkan bahwa

“Di dalam pelaksanaan pengelolaan dana BUMDes di berbagai daerah dalam prakteknya masih seringkali ditemui belum mengusung semangat gotongroyong yang terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat sehingga program yang dijalankan tidak berkesesuaian dengan akar kebutuhan masyarakat desa. Hasilnya banyak BUMDes yang kemudian mengalami *disfungsi*”

Dari telaah dokumen di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bukan hanya bumdes di desa sangiang saja yang dalam pengelolaanya bermasalah atau belum mampu mensejahterakan masyarakat desanya sehingga jelas meujukan bahwa partisipan masyarakat dalam pemberdayaan lewat unit usaha bumdes belum membuahkan hasil sesuai kebutuhan dan potensi masyarakatnya. Akan tetapi, eksistensi BUMDes selama ini pun masih bersifat fluktuatif atau kondisinya tidak stabil dikarenakan berbagai macam kendala. Sementara ditinjau dari segi pemanfaatan dan kontribusi dalam pembangunan desa hal ini sudah nampak dari berbagai jenis program bantuan ke masyarakat dalam pemberdayaannya belum menyentuh mereka.

Dari keseluruhan informasi yang diungkapkan dari keseluruhan informan dan hasil observasi serta telaah dokumen yang dilakukan peneliti di atas menunjukan bahwa :

Hasil-hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen penelitian terkait seperti yang telah disebutkan beberapa di atas, menunjukkan adanya ketidakberdayaan para nelayan miskin terhadap kondisi

sosial, ekonomi, dan politik, yang berlaku terhadap mereka di tiap-tiap daerahnya. Hal tersebut kemudian mengakibatkan kemiskinan semakin menjadi-jadi dan menekan mereka untuk tetap hidup di dalam garis kemiskinan. Diperlukan sebuah upaya dari pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan dukungan kepada para nelayan miskin ini, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan kemudian menjadi mandiri secara ekonomi karena keamanan mereka.

Untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, terutama para nelayan miskin, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dikembangkan secara nasional. Program PEMP ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Sehingga kemudian dari segala masalah dan ketidak mampuan dari bumdes bisa kemudian kita rekonstruksi kembali sesuai dengan fungsi dan tujuannya untuk pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat nelayan bagi daerah pesisir lebih khususnya desa sangiang yang secara geografisnya masuk wilayah pesisir laut.

## **B. Pembahasan**

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini

menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global. Salah satu implementasi dari program Nawacita adalah pemerintah memberikan perhatian besar terhadap desa, sebagai bagian dari kesatuan wilayah yang terendah, dengan membentuk kelembagaan Negara setingkat menteri yang mengurus permasalahan desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi agen pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara substantif diharapkan dapat membangun desa melalui pendekatan struktural maupun kultural.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat **“desa membangun”**, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalan potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya. Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa, terdapat hal yang menarik di dalamnya, bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Namun kondisi modal sosial yang

dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*Social Bonding*), jembatan sosial (*Social Bridging*) dan jaringan sosial (*Social Linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi local.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D, Koperasi dan Swasta.

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan social. Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDES merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDES dibentuk atas dasar semangat

kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDES ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, perlu di dukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi Sosial SMERU, Akhmad Fadli menjelaskan bahwa Undang-undang desa mensyaratkan tiap desa agar memiliki BUMDes, dimana konsep usaha toko ritel dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDes. Sehingga sangat dibutuhkan komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk membentuk gugus pemasaran berjaringan melalui BUMDes.

### **1. Pemanfaatan Usaha Bumdes Dikalangan Masyarakat Nelayan**

Keberadaan BUMDes di desa Sangiang diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui pemanfaatan dan pengelolaan BUMDes untuk nelayan. Dalam bagian ini, peneliti memfokuskan kepada bagaimana pemanfaatan usaha BUMDes pada masyarakat nelayan desa sangiang.

Masyarakat nelayan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Pada umumnya mereka adalah kelompok masyarakat tertinggal yang berada pada level paling bawah, baik tertinggal secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Sebagai nelayan tradisional bukan saja berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan tekanan musim, tetapi mereka juga dihadapkan manajemen pengelolaan keuangan dan pemasaran hasil produksinya.

Dalam pemanfaatan usaha bumdes pada masyarakat nelayan di desa sangiang belum membuahkan hasil dan menyentuh nelayan dan belum pernah mendapatkan atau merasakan manfaat dari bumdes itu sendiri bahkan unit-unit usaha yang dibuat oleh pengurus bumdes BUMDes Sangiang telah gagal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nelayan tidak pernah diberdayakan untuk peningkatan ekonomi desa. Buktinya sederhana, tidak ada satupun program untuk mereka. Bahkan menurut masyarakat nelayan di desa sangiang mereka mengatakan bahwa selama ini sejak berdirinya bumdes belum pernah ada sosialisasi pengurus bumdes tentang bumdes dan manfaat bumdes untuk nelayan bahkan usaha dari bumdes bagi nelayan tidak ada.

Sehingga kemudian selaras dengan Teori Fakta Sosial bahwa dalam mengkaji dan menganalisa dinamika masyarakat harus sesuai dengan kenyataan kehidupan bahkan problematika masyarakat secara nyata baik itu struktur sosial yang ada itulah yang dikaji, hal ini sesuai dengan realitas

bumdes dan masyarakat nelayan di desa sangiang sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lainnya. Selanjutnya dalam kajian Teori Structural Fungsional memandang bahwa dalam masyarakat mempunyai struktur atau susunan yang mempunyai fungsi masing-masing, kemudian sinkron dengan BUMDes sebagai lembaga Usaha milik desa yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab menyejahterakan warga desa lewat usahanya.

Kehadiran BUMDes Sangiang diharapkan menjadi jantung perekonomian masyarakat desa. Tentunya masyarakat nelayan di desa Sangiang berharap BUMDes Sangiang memiliki kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan perekonomian desa. Namun, harapan itu pupus ditengah jalan, ketika BUMDes Sangiang memutuskan hanya membentuk dua unit usaha saja, yaitu unit usaha simpan pinjam dan jual beli beras.

Padahal masih banyak potensi desa yang bisa dimanfaatkan dan sangat perlu untuk dikembangkan. Mulai dari pengolahan ikan hasil tangkapan para nelayan, sejalan dengan hal itu dalam pembangunan kelautan dan perikanan tujuan pemberdayaan diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis pengelolaan kelautan dan perikanan, perbaikan usaha perikanan dan perbaikan kehidupan nelayan dan masyarakatnya. Dengan tujuan peningkatan pengelolaan potensi desa ialah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, dimana masyarakat nelayan mayoritas memiliki tingkat kehidupan dalam garis miskin, sebab itu salah satu tujuan peningkatan potensi desa yang dikelola oleh desa sendiri agar dapat mengangkat taraf hidup masyarakat desa dan terbentuknya ketahanan dan kemandirian desa. selain itu peningkatan

potensi desa dalam pemanfaatan sumber daya alam di arahkan supaya terdapat pemeratan pendapatan masyarakat dan dikelola langsung oleh pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan di tingkat desa.

Akan tetapi semua program dan potensi tersebut tidak tepat sasaran dan hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian daripada itu dalam pemanfaatan bumdes untuk masyarakat nelayan yang masih jauh dari kata sejahtera atau berdaya, antara lain penyebabnya adalah kurangnya modal yang dimiliki para nelayan, rendahnya teknologi yang dimiliki, rendahnya akses pasar padahal dalam hal ini bumdes sangiang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Di dalam pelaksanaan pemanfaatan BUMDes dalam prakteknya masih seringkali ditemui belum mengusung semangat gotongroyong yang terlihat dari minimnya partisipasi masyarakat sehingga program yang dijalankan tidak berkesesuaian dengan akar kebutuhan masyarakat desa

Pada kondisi tersebut, berakibat potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang melimpah hingga kini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh nelayan lewat bantuan modal atau perlengkapan nelayan sesuai kebutuhan nelayan oleh karena itu bumdes sebagai badan usaha milik desa belum berhasil memberikan manfaatnya pada nelayan lewat program, usaha atau produk bumdes untuk masyarakat nelayan lewat modal yang diberikan oleh pemerintah desa untuk dikelola dalam memberdayakan masyarakat sangiang khususnya nelayan. Membantu para masyarakat untuk

meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat nelayan.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang**

Rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian ialah mengembalikan bumdes sebagai lembaga usaha milik desa sesuai dengan fungsinya dalam pemberdayaan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat nelayan desa sangiang yang berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sangiang.

Program BUMDES sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat gotong royong program BUMDES tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial. Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, social.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas

kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Berdasarkan asumsi kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat lewat bumdes. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Namun faktas social yang ada di Desa sangiang yaitu BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagaimana mestinya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan desa sangiang.

Dengan demikian masyarakat nelayan desa Sangiang sangat berharap ditinjau kembali Kebijakan sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan,

ekonomi, infrastruktur dan kelembagaan) dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan yang “tertinggal” perlu direkayasa ulang terutama yang berkaitan dengan bidang atau unit usaha yang dibentuk oleh pengurus bumdes. Disisi lain, rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada penangkapan ikan. Keterbatasan teknologi modern, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan. Secara umum, persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan: (1) kemiskinan dan kesenjangan sosial, (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, (3) rendahnya kualitas sumber daya manusia. Masalah tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Sehingga kemudian perlu kiranya Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula harus dilakukan agar kemudian terjadi perubahan dalam aspek ekonomi maupun social masyarakat nelayan.

Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat.

Hal ini selaras dengan konsep teori Perubahan Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai proses dimana dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terdapat dalam ukuran waktu tertentu artinya bahwa dengan merekonstruksi secara social ekonomi bumdes sesuai fungsi secara struktur sosial dimana di dalamnya dapat diidentifikasi ada kemajuan atau perubahan yang terjadi pada masyarakat pesisir lewat rekonstruksi bumdes sebagai lembaga usaha milik desa yang fungsinya memberdayakan masyarakat desa dan mengelola segala asset, potensi desa sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat desa sangiang yang mayoritas sebagai nelayan. Masyarakat sangat berharap pemerintah desa Sangiang melalui BUMDes mampu mengelolah sumber daya-sumber daya tersebut, namun tidak pernah ada kata untuk itu, alias tidak ada program atau unit usaha yang dibentuk oleh BUMDes untuk mengelolah sumber daya itu.

Padahal, jika potensi-potensi itu mampu dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan, BUMDes Sangiang akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, membantu meningkatkan PAD, meningkatkan perekonomian masyarakat, bahkan BUMDes Sangiang bisa membuka lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran.

### C. Interpretasi Hasil Penelitian

No	Informan	Hasil Interview	Interpretasi	Teori
1.	Sulaiman,S.Pd	Kemudian pemerintah dan pengurus BUMDes sebagai fasilitator dan regulator dalam pengembangan ekonominya demi terwujudnyakesejaheraan masyarakat, karena BUMDES merupakan wadah dari unit-unit usaha yang ada di desa.	Ini menjelaskan tentang pentingnya pemanfaatan bumdes pada masyarakat di mana dengan bumdes ini diharapkan sebagai Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangunkemandirian, termasuk pembangunan pedesaan dalam pengfungsiannya	Teori Fakta Sosial dan Teori Struktural fungsional
2.	Lisen Mahmud	Begitu besarnya potensi kelautan yang dimiliki, tapi tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan pandangan yang sangat biasa di lingkungan kehidupan nelayan wilayah pesisir	Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan yang besar, seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup	Teori Fakta Sosial

			pada potensi kelautan tersebut.	
3.	Herdin	Keberadaan BUMDes desa Sangiang diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan	Kemudian BUMDes dalam peimplementasinya diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan untuk meningkatkan kehidupan dan pendapatan nelayan sebagai bagian dari potensi desa yang melimpah ikan tangkapan nelayan	Teori Perubahan Sosial Teori Struktural fungsional
4.	Nasrullah S.Hut	Pemerintah desa sudah membangun beberapa fasilitas publick untuk membantu perekonomian warganya salah satunya ialah TPI dimana pelelangan dan penjualan ikan hasil tangkap nelayan dilakukan	Sayangnya dalam realitas social kehidupan social ekonomi masyarakat nelayan mereka masih kekurangan SDM dan pengetahuan tentang ekonomi yang menguntungkan untuk itu perlunya BUMDes Desa Sangiang mengelolanya agar kemudian	Teori Fakta Sosial

			pemanfaatan dan pemberdayaan pada nelayan berhasil.	
5.	Obin Mukhtar	Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sehingga ada peningkatan dalam hidup masyarakatnya	BUMDes dapat berdiri dengan tujuan sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di pedesaan tetapi dengan biaya produksi dan pengelolaan tidak terlalu tinggi. Namun, di Desa Sangiang masih mengalami beberapa kendala di dalam pemberdayaan BUMDes, diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan BUMDes	Teori Perubahan Sosial Teori Struktural fungsional Teori modal sosial
6.	Aidin	Selama ini nelayan belum merasakan program dan	Dengan demikian masyarakat nelayan desa	Teori Perubahan

		<p>perhatian dari pemerintah desa lebih-lebih dari pihak pengurus BUMDes memberikan bantuan terhadap nelayan di desa sangiang . nelayan biasa mendapatkan bantuan dari Tim Kampanye Politik .</p>	<p>Sangiang sangat berharap ditinjau kembali Kebijakan sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan kelembagaan) dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Untuk diperlukan peran aktif BUMDes dalam membantu segala kebutuhan nelayan desa sangiang demi keuntungan BUMDes nanti dalam memanfaatkan segala Potensi yang tujuan adalah peningkatan kehidupan nelayan lebih baik.</p>	<p>Sosial</p>
--	--	---	---	---------------

Dari hasil interpretasi diatas dapat disimpulkan bahwa bumdes dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pemberdayaan untuk masyarakat desa dengan berbagai program dan usaha untuk masyarakat nelayan desa sangiang belum menyentuh dan memberikan manfaatnya dalam

pemberdayaan masyarakat nelayan yang kemudian diharapkan memberikan peningkatan SDM nelayan dan meningkatkan perekonomian mereka khususnya desa sangiang dan BUMDes sebagai badan usaha milik dengan yang di berikan modal oleh desa untuk pemberdayaan masyarakat desa lebih-lebih para nelayan. Hal ini didapatkan melalui hasil wawancara dari beberapa informan yang telah memberikan informasi mengenai pemanfaatan BUMDes untum masyarakat Nelayan desa sangiang. Dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat Desa sangiang.

### **1. Cara Kerja Teori**

Dalam penjelasan cara kerja teori ini menjelaskan bagaimana teori yang digunakan dalam skripsi ini dapat memperkuat dan mendukung terkait hal telah diteliti oleh peneliti. Sehingga pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan dengan bantuan penguatan teori yang digunakan.

#### **a. Pemanfaatan Usaha Bumdes Dikalangan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang.**

Keterkaitan teori dengan rumusan masalah adalah rumusan masalah menjelaskan mengenai Pemanfaatan Usaha Bumdes, Adapun pemanfaatan BUMDes pada nealayan yang didapatkan oleh penulis dari beberapa sumber informan dan dari hasil observasi langsung antara lain yaitu menunjukkan bahwa BUMDes tidak memberikan manfaatnya kepada nelayan sehingga kondisi ekonomi bahkan pekerjaan nelayan tidak berkembang apalagi melahirkan inovasi baru bumdes untuk pemberdayaan

nelayan. Sehingga kemudian selaras dengan Teori Fakta Sosial bahwa dalam mengkaji dan menganalisa dinamika masyarakat harus sesuai dengan kenyataan kehidupan bahkan problematika masyarakat secara nyata baik itu struktur sosial yang ada itulah yang dikaji, hal ini sesuai dengan realitas bumdes dan masyarakat nelayan di desa sangiang sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lainnya.

Teori Fungsionalisme struktural melihat individu sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang besar. Sistem sosial ini bekerja untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial. Masyarakat, dengan demikian adalah kumpulan dari individu-individu yang bekerja dalam sebuah sistem untuk menjaga stabilitas sosial. Durkheim sendiri melihat masyarakat sebagaimana organisme. Organisme tersusun atas beberapa komponen yang memainkan peranannya masing-masing. Apabila masing-masing komponen bergerak sendiri, organisme akan mengalami disfungsi atau gagal berfungsi. Teori struktural fungsional melihat institusi atau lembaga sosial sebagai komponen dari sistem sosial. Masing-masing lembaga didesain untuk menjalankan fungsinya sama seperti halnya BUMDes.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang**

Keterkaitan teori dengan rumusan masalah adalah rumusan masalah menjelaskan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang. Adapun yang didapatkan oleh penulis dari beberapa sumber

informan dan dari hasil observasi langsung antara lain yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Namun faktas social yang ada di Desa sangiang yaitu BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagaimana mestinya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan desa sangiang. Dengan demikian masyarakat nelayan desa Sangiang sangat berharap ditinjau kembali Kebijakan sosial ekonomi (pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan kelembagaan) dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Konsep teori Perubahan Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai proses dimana dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terdapat dalam ukuran waktu tertentu artinya bahwa dengan merekonstruksi secara social ekonomi bumdes sesuai fungsi secaras truktur sosial dimana di dalamnya dapat di identifikasikan ada kemajuan atau perubahan yang terjadi pada masyarakat pesisir lewat rekonstruksi bumdes sebagai lembaga usaha milik desa yang fungsinya memberdayakan masyarakat desa dan mengelola segala asset, potensi desa sesuai dengan kebutuhan serta kondisis masyarakat desa sangiang yang mayoritas sebagai nelayan. Dan setelah penulis melakukan penelitian teori ini memang berfungsi dalam menjelaskan tentang prose pemberdayaan dan pemanfaatan BUMDes dalam memberikan perubahan pada masyarakat.

Dalam kajian Level mekanisme modal sosial dapat mengambil bentuk kerjasama. Kerjasama sendiri merupakan upaya penyesuaian dan koordinasi tingkah laku yang diperlukan untuk mengatasi konflik ketika tingkah laku seseorang atau kelompok dianggap menjadi hambatan oleh seseorang atau kelompok lain. Akhirnya tingkah laku mereka menjadi cocok satu sama lain. Hal ini sinkron dengan rumusan masalah terkait pemberdayaan masyarakat nelayan yang tujuan dan fungsi bumdes sebagai modal social masyarakat diharapkan ada peningkatan ekonomi anatar BUMDes dan Masyarakat nelayan, sehingga tidak mungkin untuk perubahan tidak terjadi, disatu perlu kiranya mereinstruksi BUMDes sangiang sebagai modal social masyarakat nelayan dalam pemanfaatan serta pemberdayaanya terjadi.

## **2. Nilai Kebaruan Hasil Penelitian**

Pada penelitian ini memiliki banyak hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau kelompok pemberdayaan masyarakat, Tetapi pada setiap penelitian memiliki beberapa perbedaan atau nilai kebaruan dari penelitian sebelumnya. Hal ini yang menjadi perbedaan adalah dari judul penelitian yang sebelumnya kebanyakan meneliti tentang peranan LSM sebagai pendamping dalam upaya mensejahterakan masyarakat di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang Bagaimnakah pemanfaatan BUMDes dikalangan masyarakat nelayan Desa Sangiang

Kabupaten Bima. Selain itu juga terdapat pada landasan teori yang di gunakan peneliti sebelumnya tidak menggunakan landasan teori sedangkan penelitian ini menggunakan teori Fakta social dan teori perubahan Sosial Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dibanding dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang menggunakan *filed research*. Sumber informasi yang didapatkan terkait dengan perempuan pekerja ini juga menjadi nilai kebaruan karena berasal pada sumber atau informan yang berbeda.



## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sangiang Sangiang, maka dapat ditarik kesimpulan tentang “Rekonstruksi Sosial Ekonomi (Studi BUMDes Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima).” Adalah sebagai berikut :

1. Bumdes Dalam pemanfaatan Usaha BUMDES pada masyarakat nelayan Di Desa Sangiang belum membuahkan hasil dan menyentuh nelayan dan belum pernah mendapatkan atau merasakan manfaat dari BUMDES itu sendiri bahkan unit-unit usaha yang dibuat oleh pengurus bumdes BUMDES Sangiang telah gagal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nelayan tidak pernah diberdayakan untuk peningkatan ekonomi desa. Buktinya sederhana, tidak ada satupun program untuk mereka. Bahkan menurut masyarakat nelayan di Desa Sangiang mereka mengatakan bahwa selama ini sejak berdirinya BUMDES belum pernah ada sosialisasi pengurus BUMDES tentang bumdes dan manfaat BUMDES untuk nelayan bahkan usaha dari bumdes bagi nelayan tidak ada.
2. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas

membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula harus dilakukan agar kemudian terjadi perubahan dalam aspek ekonomi maupun social masyarakat nelayan. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep teori Perubahan Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai proses dimana dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terdapat dalam ukuran waktu tertentu artinya bahwa dengan merekonstruksi secara social ekonomi BUMDES Sesuai fungsi secara truktur sosial dimana di dalamnya dapat di identifikasikan ada kemajuan atau perubahan yang terjadi pada masyarakat pesisir lewat rekonstruksi BUMDES sebagai lembaga usaha milik Desa yang fungsinya memberdayakan masyarakat Desa dan mengelola segala asset, potensi Desa sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat desa sangiang yang mayoritas sebagai nelayan.

## B. Saran

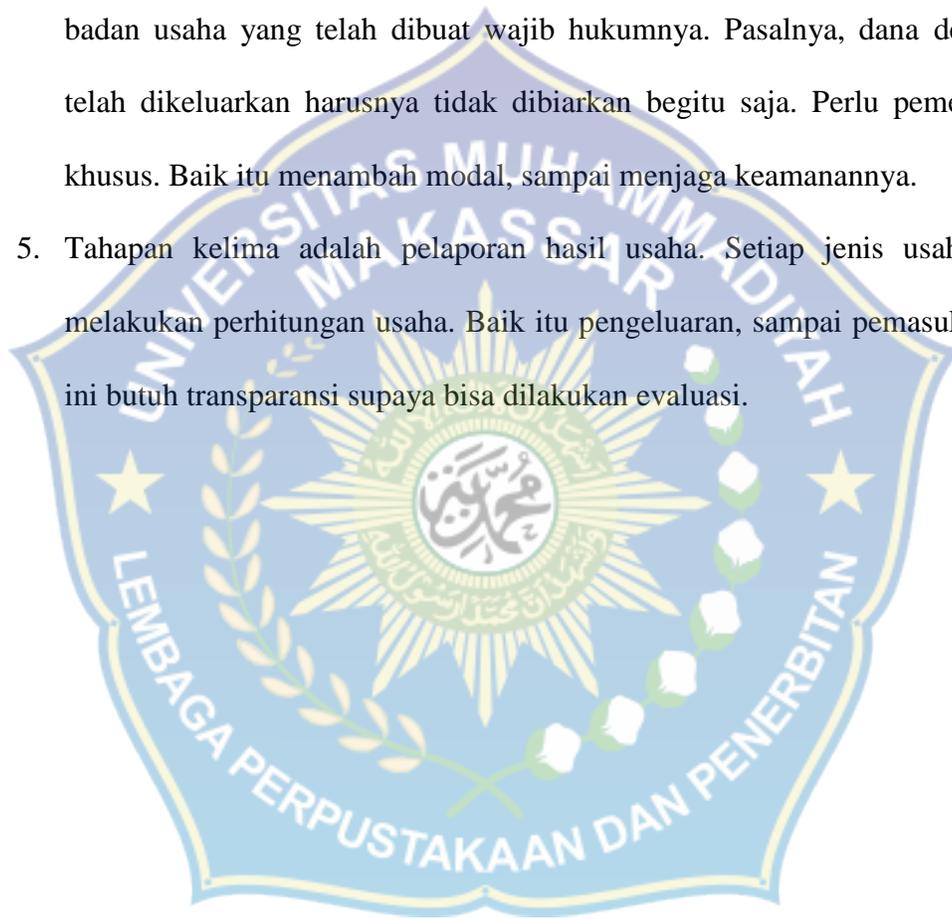
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulannya, maka dapat disampaikan saran-saran untuk ditindak lanjuti bahwa:

BUMDES sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian permodalannya berasal dari desa. Modal yang disisihkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik. Kuncinya adalah pengelolaan dari pihak desa yang baik. Aset yang dimilikinya bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan benefit. Benefit (keuntungan) inilah yang secara tidak langsung akan menjadi tonggak utama dalam menambah pendapatan desa.

Bicara mengenai pengelolaan badan usaha oleh pimpinan desa, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ketika dipraktekkan dengan benar, pengelolaan bumdes akan sangat bermanfaat bagi desa yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan pertama yang bisa dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan ini meliputi pembentukan organisasi, penentuan jenis usaha, pengaturan jalannya usaha. Kesemuanya harus direncanakan secara matang demi terwujudnya badan usaha yang terus berkembang.
2. Tahapan kedua adalah pengamatan. Pihak desa harus mengamati aset desa yang dipandang bagus untuk usaha. Tentunya, ini harus dilihat dari seberapa besar potensi berkembangnya usaha yang akan dimasuki di desa tersebut.

3. Tahapan ketiga adalah penataan jenis usaha. Tentunya tidak hanya satu jenis usaha yang bisa dimasuki. Ada beberapa jenis usaha yang perlu dikelola di bawahnya. Hal ini harus dikelola dengan baik supaya berjalan maksimal.
4. Tahapan keempat adalah pemeliharaan. Bagi pemerintah desa, pemeliharaan badan usaha yang telah dibuat wajib hukumnya. Pasalnya, dana desa yang telah dikeluarkan harusnya tidak dibiarkan begitu saja. Perlu pemeliharaan khusus. Baik itu menambah modal, sampai menjaga keamanannya.
5. Tahapan kelima adalah pelaporan hasil usaha. Setiap jenis usaha wajib melakukan perhitungan usaha. Baik itu pengeluaran, sampai pemasukan. Dan ini butuh transparansi supaya bisa dilakukan evaluasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W. 2010. *Reserch Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Desyandri. 2013. *Aliran Filsafat Rekonstruksi Sosial/Budaya*, (online), (<https://desyandri.wordpress.com/2013/12/27/aliran-filsafat-rekonstruksi-sosialbudaya/>, diakses 24 Januari 2018).
- Fink, Hans. *Filsafat Sosial Dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddnes, Anthony. 2009. *Problematika Utama Dalam Teori Sosial Aksi, Struktur, Dan Kontradiksi Dalam Analisis Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddnes, Anthony. 2016. *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jahar, Asep Saipudin dkk. 2013. *Sosiologi Sebuah Pengantar Tinjauan Pemikiran Sosiologi Islam*. Jakarta: Laboratorim Sosiologi Agama.

- Rahim, Manat dkk. 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Pesisir Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara*. Journal The WINNERS. 15 (1): 23-33.
- Ritzer, George. 2014. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sujarwa. 2014. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar Manusia Dan Fenomena Sosial Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samadara, Salfasina dkk. 2016. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kemitraan (Studi Kasus Nelayan Desa Sulamu Kabupaten Kupang NTT)*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. 4 (1).
- Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda.
- Turner, Bryan S. 2012. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Sonyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, Haw. 2014. *Otonomi Desa Merupakan otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Yusuf, Muh. Jufri. 2013. *Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Nunukan ( Studi Kasus Di Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan)*. Journal Ilmu Pemerintahan. 1 (4).
- Ratna Azis Prasetyo Airlangga University : *Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016
- Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana: *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng 2018*. Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018
- Darma Metusala 2005 : *Pemberdayaan Komunitas Nelayan Melalui Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah)* Jurnal IPB.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo 2016 : *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- ❖ LAMPIRAN 1 DAFTAR NAMA INFORMAN
- ❖ LAMPIRAN 2 DAFTAR PERTANYAAN
- ❖ LAMPIRAN 3 DATA HASIL WAWANCARA
- ❖ LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENELITIAN
- ❖ LAMPIRAN 5 PERSURATAN



**DAFTAR NAMA  
INFORMAN**

## DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Nama : Sulaiman, S.Pd  
Umur : 33 tahun  
Pekerjaan : Guru, Ketua Bumdes

2. Nama : Lisen Mahmud  
Umur : 27 tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta, Ketua Unit Simpan Pinjam Bumdes

3. Nama : Herdin  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Nelayan, Tukang Kayu

4. Nama : Nasrullah S.Hut  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Sekertaris Desa Sangiang

5. Nama : Obin Mukhtar  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Guru. Bendahara Bumdes

6. Nama : Aidin  
Umur : 35 Tahun  
Pekerjaan : Nelayan





**DAFTAR PERTANYAAN**

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimanakah pemanfaatan BUMDes pada masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?
2. Bagaimanakah rekonstruksi sosial ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?
3. Bagaimanakah bumdes dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?
4. Apakah bumdes memberikan bantuan kepada nelayan berupa modal atau perlengkapan nelayan
5. Apa Dasar hukum yang mendasari adanya Badan Usaha Milik Desa?
6. Dari mana saja Modal untuk usaha BUM Desa didapat.
7. Bagaimana tahap-tahap dalam proses kerja Bumdes?
8. Apa saja hasil usaha Bumdes ?
9. Seperti apa struktur organisasi Bumdes? Siapa yang bisa berperan dalam struktur organisasi Bumdes ?
10. Penting kah pendirian Bumdes dilakukan untuk kemajuan Desa?
11. Jenis usaha apa saja yang cocok untuk dikelola Bumdes di desa sangiang?
12. Bagaimana jika merasa bahwa Desa tidak memiliki potensi? Bagaimana cara melakukan pemetaan potensi Desa?
13. Unit usaha apa saja yang dikelola atau dikembangkan oleh BUM Des selama 1 periode ini ?.
14. Dari total modal yang diberikan desa selama ini dan bagaiman pembagiannya setiap Unit usaha, menguntungkan atau malah rugi ?

15. Pernahkah pengurus melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUM Des kepada Kepala Desa ?
16. Pernahkah BUMde membuat laporan keuangan setiap unit-unit usaha tiap bulan ?
17. Pernahkan BUM Des membuat laporan perkembangan kegiatan Unit unit usaha BUM Des dan memberikan laporan itu kepada masyarakat ?





**DATA HASIL  
WAWANCARA**

NO	NARASUMBER	PERTANYAAN	JAWABAN
1	<p>Nama: Aidin Umur: 64 Tahun Pekerjaan: Nelayan</p>	<p>1. Bagaimanakah pemanfaatan BUMDes pada masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?</p>	<p>Setau saya BUMDES tidak ada bantuannya berupa senar,kail maupun modal untuk melaut kepada saya apalagi datang melihat melihat kondisi nelayan di dusun tewo, saya hanya mendengar Bumdes banyak uangnya tapi saya tidak pernah dapat sumbangan uang dari BUMDES apalagi bantuan perlengkapan apalagi merasakan manfaatnya bagi nelayan sekitar sini</p>
2	<p>Nama : Sulaiman., S.Pd Umur : 33 Tahun Pekerjaan :Guru Dan Ketua Bumdes</p>	<p>1. Bagaimana bumdes memanfaatkan modal untuk membuat usahanya ?</p>	<p>BUMDES Sangiang saat ini memiliki unit usaha simpan pinjam, unit jual beli beras. Unit usaha ini merupakan sebuah strategi untuk mendongkrak semangat masyarakat untuk lebih semangat membangun desa melalui BUMDES karena BUMDEs juga merupakan hal baru yang masyarakat juga kurang begitu mengenal, jadi</p>

			<p>lewat unit usaha awal ini harapan pengurus BUMDES memancing unit usaha lainnya akan bermunculan dengan beriringnya waktu dalam memanfaatkan modal usaha..</p>
		<p>2. Apa Dasar hukum yang mendasari adanya Badan Usaha Milik Desa?</p>	<p>Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>3. Apa hasil usaha Bumdes ?</p>	<p>Nyatanya, hasil pengelolaan dan pengembangan dua unit usaha tidak berdampak positif terhadap PAD Sangiang. Pasalnya, dalam kurun waktu hampir 2 tahun berjalan, BUM Desa Sangiang hanya mampu meraup untung sekitar 3 juta</p>

			<p>rupiah lebih. Detail keuntungan yang didapat yaitu, 1 juta rupiah lebih sedikit dari unit usaha simpan pinjam dan 2 juta lebih sedikit dari unit usaha jual beli beras</p>
3	<p>Nama : Lisen Mahmud Umur : 27 tahun Pekerjaan:Wiraswasta, Ketua Unit Simpan Pinjam Bumdes</p>	<p>1. Bagaimanakah pemanfaatan BUMDes pada masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?</p>	<p>Melihat potensi sdm masyarakat desa yang banyak bekerja sebagai nelayan dan petani pengurus merintis usaha, maka BUMDes mendirikan unit usaha simpan pinjam. Inisiatif ini untuk membantu permodalan sebesar RP.17.000.000 masing-masing 1 juta rupiah perorang untuk mengembangkan pekerjaannya. BUMDES memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah sehingga tidak memberatkan masyarakat</p>
		<p>2. Dari mana saja Modal untuk usaha BUMDes didapat ?</p>	<p>Melalui Anggaran Dana Desa, Pemerintah desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima telah memberikan akses modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebesar 40 juta rupiah. Akses modal tersebut dianggarkan secara bertahap, yaitu pada tahun 2015 sebesar 20 juta</p>

			<p>rupiah dan anggaran pada tahun 2016 sebesar 20 juta rupiah. Namun yang diterima oleh BUM Desa hanya 35 juta rupiah saja</p>
4	<p>Nama : Nasrullah S.Hut</p> <p>Umur : 40 Tahun</p> <p>Pekerjaan :Sekertaris Desa Sangiang</p>	<p>1. Bagaimanakah rekonstruksi sosial ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?</p>	<p>pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pengurus BUMDES dan perangkat Desa Sangiang awalnya menggali dan mengobservasi potensi desa.. Karena BUMDES ini dibentuk sebagai wadah dari unit-unit usaha yang ada di desa dan pemangku kebijakan. BUMDES Sangiang saat ini memiliki unit usaha simpan pinjam, unit jual beli beras bagi masyarakat Desa Sangiang yang membutuhkannya.</p>
		<p>2. Bagaimana tahap-tahap dalam proses kerja Bumdes?</p>	<p>Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMDES dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Disamping itu, keberadaan BUMDES juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa yang memungkinkan desa</p>

			mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal sesuai dengan UU.
		3. Penting kah pendirian Bumdes dilakukan untuk kemajuan Desa	Dasar pemikiran pentingnya pendirian BUMDES didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi
5	Nama : Obin Mukhtar Umur : 27 Tahun Pekerjaan: Guru honorer dan Bendahara Bumdes	1. Bagaimanakah bumdes dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan Desa Sangiang Kabupaten Bima?	BUMDES Sangiang dalam mengelola akses modal yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sangiang berhasil membentuk dua unit usaha sekaligus, Yaitu unit usaha Simpan Pinjam dengan bunga rendah dan Bisnis jual beli beras. Kedua unit usaha tersebut dikelola dan dikembangkan selama hampir 2 tahun berharap sebagai alternatif ekonomi baru.

		2. Apa potensi Desa sangiang ?	potensi perikanan, peternakan, pertanian, sumber daya manusia dan potensi kerajinan tangan masyarakat.
6	Nama : Herdin Umur : 50 Tahun Pekerjaan: Nelayan, Tukang Kayu	1.Apakah bumdes memberikan bantuan kepada nelayan berupa modal atau perlengkapan nelayan	Setau saya BUMDES tidak ada bantuannya berupa senar,kail maupun modal untuk melaut kepada saya apalagi datang melihat melihat kondisi nelayan di dusun tewo, saya hanya mendengar Bumdes banyak uangnya tapi saya tidak pernah dapat sumbangan uang dari bumdes apalagi bantuan perlengkapan,
		2.Jenis usaha apa saja yang cocok untuk dikelola Bumdes di desa sangiang?	pengolahan ikan hasil tangkapan para nelayan, membantu para peternak dengan memberikan akses jual beli ternak
7	Nama :wujha Umur : 40 Tahun Pekerjaan : nelayan dan bertani	1.Apakah bumdes memberikan bantuan kepada nelayan berupa modal atau perlengkapan nelayan	Untuk bantuan alat-alat untuk menunjang keperluan nelayan setau saya belum ada untuk warga sekitar sini tidak tau warga nelayan lainnya mungkin ada tapi selama ini dengar tidak ada bantuan dari BUMdes berupa uang, pukot, mesin sampan atau tali pancing dan seingat saya belum ada pengurus bumdes/pemerintah desa

			datang melihat nelayan apalagi memberikan bantuan
		2. Jenis usaha apa saja yang cocok untuk dikelola Bumdes di desa sangiang?	membantu para pengrajin sarung tenun lalu hasilnya dijual atau olah ikan tangkapan nelayan, menjual ikan nelayan dan, membantu menjual hasil pertanian masyarakat yang ada di desa Sangiang





**DOKUMENTASI  
PENELITIAN**



Gambar : TPI Desa Sangiang (Tempat Pelelangan Ikan) tidak digunakan



Gambar : Foto Bersama Pengurus Bumdes



Gambar : Foto Bersama Ketua BUMDES Desa Sangiang



Gambar : Foto Perahu Nelayan



Gambar : Dermaga Desa Sangiang



Gambar : Suasana Laut Desa Sangiang



Gambar : Pasar Bahari Desa Sangiang tidak digunakan, terbengkalai



Gambar : Perahu Tradisional Milik Nelayan Desa Sangiang



Gambar : Seorang Tengkulak Penjual Ikan



Gambar : Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Desa Sangiang Dijual Kembali Oleh Tengkulak

## RIWAYAT HIDUP



Irdansyah, lahir di Sangiang, pada tanggal 11 juni 1996. Penulis adalah anak terakhir dari 5 bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan H. Ulama dan Ibunda tercinta Hj. Armah. Penulis menempuh pendidikan pertama pada tahun 2002-2008 di SDN 1 Sangiang. Kemudian melanjutkan ke tingkat pendidikan di SMPN 3 Wera pada tahun 2009-2011, dan melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 WERA 2011-2014. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2014. Penulis mengambil program s1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sosiologi. Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di jenjang pendidikan sebagai bekal kehidupan dunia akhirat dan semoga mendapat rahmat dari Allah Ta'ala di kemudian hari. Selama masa pendidikannya penulis terlibat secara aktif di dunia organisasi internal maupun eksternal kampus, sejak 2014, Pengalaman organisasi Gerakan Mahasiswa Sangiang (GERMAS) Bima Makassar (Sekertaris Umum Periode 2015-2016), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ Sosiologi) Universitas Muhammadiyah Makassar (Anggota Bidang Kemuhammadiyaan Periode 2016-2017), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Kampus Liga Dakwah Mahasiswa (LDK LDM) Universitas Muslim Indonesia (UMI).(Anggota),Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan (anggota periode 2016-2017), Himpunan Mahasiswa Wera (HMW) Bima Makassar. (Dewan Penasehat Lembaga Periode 2018-219),Aktivis Rakyat Daerah (ARD). Bima Makassar (anggota Pendiri), Aktif Di Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI Komisariat STIK YAPMA). Dan Alhamdulillah sekarang ini telah berhasil menyusun tugas akhir dengan judul “REKONSTRUKSI SOSIAL EKONOMI (STUDI BUMDES SEBAGAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DESA SANGIANG KABUPATEN BIMA)”.

